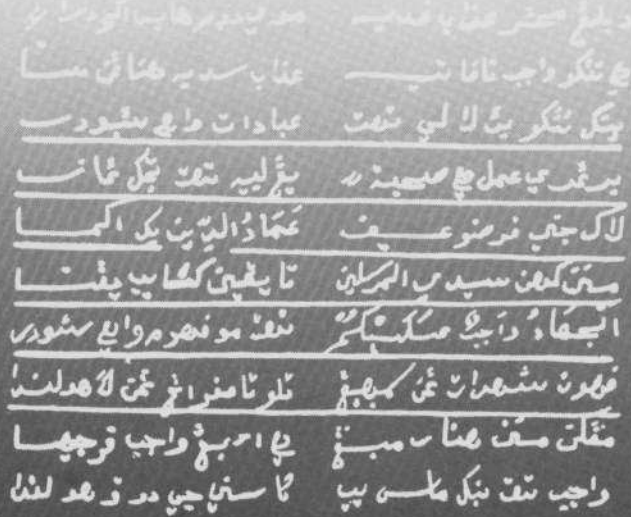
n
2610
N

DRS. ANAS MACHMUD

KEDAULATAN ACEH
YANG TIDAK PERNAH DISERAHKAN KEPADA BELANDA ADALAH BAHAGIAN DARI
KEDAULATAN INDONESIA



Wahai para Teungku jangan ragu-ragu,
Penuhilah kewajiban-kewajiban Agama hai Saudara,
Wahai sahabat tiada kewajiban yang lebih penting,
Yang melebihi kewajiban berperang,
Dan sekarang kewajiban berperang menjadi kewajiban pribadi,
Salah satu tiang Agama,
Demikian pesan Utusan Tuhan,
Marilah kita yang berada di sini sekarang menyadari sepenuhnya,
Perang Sabil adalah kewajiban Anda,
Ketahuilah wahai Saudara,
Yang pertama Iman kepada-Nya,
Yang kedua sembahyang,
Dan yang ketiga kewajiban berperang melawan Belanda.
(Cuplikan dari *Hikayat Prang Sabi*)

"Bulan Bintang"

P056 769 156

BIBLIOTHEEK KITLV

0009 6527

KEDAULATAN ACEH
YANG TIDAK PERNAH DISERAHKAN
KEPADA BELANDA
ADALAH BAHAGIAN DARI
KEDAULATAN INDONESIA

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1987
Kutipan Pasal 44
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta 1987

1. **Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)..**
2. **Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

n - 2610 - N

Drs. Anas Machmud

KEDAULATAN ACEH YANG TIDAK PERNAH DISERAHKAN KEPADA BELANDA ADALAH BAHAGIAN DARI KEDAULATAN INDONESIA



Bulan Bintang
Jakarta, Indonesia
1988

Kedaulatan Aceh yang tidak pernah diserahkan kepada Belanda
adalah bahagian dari Kedaulatan Indonesia
oleh Drs. Anas Machmud
PT Bulan Bintang, Jakarta, 1988
ISBN 979-418-122-6

Hak Cipta © Drs. Anas Machmud

Hak Penerbitan dipegang oleh
PT Bulan Bintang
Jl. Kramat Kwitang I/8, Jakarta 10420
Telp. 342-883 & 346-247

88.013.01 2.500

MUKADDIMAH

Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh 1983 diadakan bertepatan dengan ulang-tahun ke-110 Perang Aceh yang terkenal dengan **Perang di Jalan Allah**, berhubung dalam tahun ini MUI Daerah Istimewa Aceh mempelopori pelaksanaan peringatan ulang-tahun ke-110 Perang di Jalan Allah yang berlangsung selama 69 tahun (1873-1942).

Rapat Kerja MUI Daerah Istimewa Aceh ditutup pada tanggal 26 Maret 1983, pukul 20.30, bersamaan dengan upacara memperingati ulang-tahun Perang di Jalan Allah yang ke-110, yang dihadiri sekitar 1.000 orang undangan, yang terdiri dari para pejabat sipil dan militer, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin rakyat, tokoh-tokoh angkatan muda, termasuk di dalamnya Gubernur Aceh dan Panglima Kodam I Iskandar Muda.

Dalam upacara yang amat bersejarah itu, sebuah ceramah ilmiah telah disampaikan oleh saudara Drs. Anas Machmud, yang waktu itu beliau berkedudukan sebagai Ketua Jurusan Sejarah IKIP Sumatera Utara, Medan. Adalah orangnya benar, kalau saudara Drs. Anas Machmud menguraikan ceramah ilmiah yang berjudul "Kedaulatan Aceh yang tidak pernah diserahkan kepada Belanda adalah bahagian dari kedaulatan Indonesia", karena beliau seorang pakar sejarah yang sangat mendalami sejarah tanah air Indonesia, terutama sejarah Aceh, sekalipun beliau berasal dari Sumatera Barat. Mungkin, karena hubungan Aceh dengan Sumatera Barat (Minangkabau) sejak zaman permulaan sejarah Islam di Nusantara erat sekali.

Kalau Drs. Anas Machmud menegaskan dalam ceramah ilmiahnya itu, bahwa *Kedaulatan Aceh* adalah bahagian dari *Kedaulatan Indonesia*, adalah tepat sekali, karena kenyataan sejarah memang demikian.

Orang yang rajin mempelajari sejarah kolonialisme Barat di Nusantara akan mengetahui bahwa Kerajaan Aceh Darussalam telah memegang peranan yang amat penting dalam peperangan mempertahankan *Kedaulatan Bangsa- Bangsa* di Nusantara ini.

Sejarah telah mencatat, bagaimana heroiknya Sultan Alaiddin Ali Mughaiyat Syah memukul kekuasaan Portugis pada awal abad ke-16 di pantai-pantai Aceh (Lamno, Lubok, Pidie, Pasai), hatta hancur berkeping-keping, dan karenanya selamatlah Pulau Sumatera.

Waktu menjelang akhir abad ke-16, Portugis mengirim armadanya yang kuat di bawah pimpinan dua orang laksamananya yang berpengalaman. Sultan Alaiddin Al Mukammil memimpin sendiri Armada Selat Melaka Aceh yang di bawahnya terdapat dua orang laksamana angkatan laut Aceh, untuk meyongsong armada kolonialis Portugis sebelum mereka sampai di perairan Banda Aceh Darussalam, dan terjadilah "Pertempuran Teluk Haru" (perairan Sumatera Timur sekarang), sebuah pertempuran laut yang amat dahsyat antara Armada Selat Melaka Aceh dan Armada Kolonialis Portugis. Dalam pertempuran Teluk Haru tersebut armada Portugis hancur benar-benar, dua orang laksamananya mati, meskipun dua orang laksamana Aceh juga syahid bersama kira-kira 1.000 orang prajuritnya.

Kalau, andaikata, Portugis menang dalam "Perang Teluk Haru", mungkin sekali seluruh Pulau Sumatera akan menjadi jajahan Portugis, bahkan juga seluruh Pulau Jawa.

Waktu Portugis, setelah kalah di perairan Sumatera, tetap menjajah Melaka dan bersekongkol dengan beberapa orang sultan di Semenanjung Tanah Melayu (antaranya Sultan Johor, Sultan Pahang, dan lain-lain), maka Sultan Al Kahhar mengirimkan Angkatan Laut Aceh ke Tanah Seberang, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, dengan tujuan untuk membebaskan Nusantara ini dari penjajahan Barat.

Sekalipun para sultan Aceh tidak berhasil membebaskan Melaka, namun kerajaan-kerajaan Islam lain di Semenanjung Tanah

Melayu telah dapat diselamatkan dari penjajahan Portugis waktu itu.

Aceh yang telah ditakdirkan Allah menjadi salah satu dari **Lima Besar Islam** di dunia (Kerajaan Islam Marokko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Turki Usmaniyah di Asia Kecil, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Acra di India, dan Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara) merasa berkewajiban melindungi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kepulauan Nusantara dari penyerangan dan penjajahan Barat Kristen.

Karena Islam mengajarkan bahwa kaum Muslimin semuanya bersaudara, maka Kerajaan Aceh Darussalam berkeyakinan bahwa penjajahan terhadap salah satu kerajaan Islam lain di Nusantara, sama artinya seperti penjajahan terhadap dirinya sendiri, dan karenanya merasa terpanggil untuk berperang dengan "Penjajah Portugis" dan kemudian dengan "Penjajah Belanda".

Apabila pada suatu waktu bencana besar benar-benar telah menimpa Dunia Islam, dan Lima Besar Islam telah dikeroyok sedemikian rupa, sehingga tidak berdaya lagi. Kerajaan Islam Acra telah menjadi puing, Kerajaan Islam Isfahan telah pecah berkeping, Kerajaan Islam Marokko telah terkoyak-koyak, Kerajaan Islam Turki Usmaniyah telah lumpuh. Dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam bukan saja telah teruk, tetapi ia juga telah dikepung dari segala penjuru oleh kaum kolonialis, yaitu oleh kolonialis Inggris yang telah menjajah Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, dan Borneo Utara; oleh kolonialis Belanda yang menjajah seluruh Sumatera (kecuali Aceh), seluruh Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagainya.

Dalam keadaan demikian, tugas yang diemban Kerajaan Aceh Darussalam sebagai salah satu dari Lima Besar Islam, sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Sekarang, kemungkinan yang ada, ialah mempertahankan Kedaulatan Aceh sendiri yang merupakan sisa Kedaulatan Bangsa Indonesia/Nusantara. Untuk itulah, maka Aceh melakukan *Perang di Jalan Allah* 69 tahun lamanya, sehingga dalam bulan Maret 1942 Belanda terpaksa *lari dari Tanah Aceh, sebelum tentara Jepang mendarat di pantai-pantai Aceh, tanpa mereka pernah menerima penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Aceh Darussalam*, karena Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah, Sultan Aceh terakhir, *tidak mau menanda-ta-*

ngani Sarakata Penyerahan Kedaulatan Aceh kepada Belanda. Karena itu, pada waktu Belanda menyerahkan Kedaulatan Indonesia kepada Jepang, tidaklah termasuk Aceh, artinya Kedaulatan Aceh yang menjadi bahagian dari Kedaulatan Bangsa Indonesia masih ada, sehingga dengan *Modal Kedaulatan* yang masih ada itu, dalam bulan Agustus 1945 dengan serentak Bangsa Indonesia berjuang gigih untuk merebut kembali *sebahagian besar kedaulatannya yang telah direbut kaum penjajah.*

Akhirnya, pada penghujung Desember 1949, Belanda terpaksa menyerahkan kembali *bahagian-bahagian kedaulatan* yang telah dirampas kepada Bangsa Indonesia ...

Wabillahit Taufik Wal Hidayah.

Banda Aceh Darussalam, 26 Maret 1988

Pimpinan MUI Daerah Istimewa Aceh

Prof. A. Hasjmy
Ketua Umum

SEPATAH KATA

Pada tahun 1983 saya dapat kesempatan menyampaikan ceramah ilmiah sehubungan dengan Peringatan Seratus Sepuluh Tahun Pecahnya Perang Aceh, yaitu 26 Maret 1873 - 26 Maret 1983.

Pada waktu itu di Banda Aceh sedang dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Propinsi dan Musyawarah Majelis Ulama se-Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Makanya malam Peringatan 110 Tahun Pecahnya Perang Aceh itu selain dihadiri para pejabat sipil-militer, ilmuwan Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry juga ulama-ulama dari Jakarta dan berbagai daerah seluruh Aceh.

Ternyata pidato ilmiah saya itu mendapat sambutan luar biasa baik dalam pertemuan itu sendiri maupun dalam berbagai pertemuan ilmiah lain sesudah itu. Gubernur Aceh Hadi Thajeb dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Prof. Ibrahim Hosen menyambut hangat pidato saya dalam pertemuan itu dan mengharapkan pidato ceramah saya itu diperbanyak dan disebarluaskan agar masyarakat lebih memahami arti dan makna sesungguhnya dari Perang Aceh itu yang sangat berguna dalam membina ketahanan nasional kita.

Sehubungan dengan itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah lama meminta saya untuk mengembangkan konsep pidato saya itu menjadi buku yang akan diterbitkan. Harapan Prof. A. Hasjmy itu sesungguhnya suatu kesempatan yang sangat baik bagi saya, dan saya telah berjanji untuk memenuhinya. Ternyata disebabkan berbagai hal, an-

taranya disebabkan kesehatan saya yang sangat terganggu pada tahun 1985 sampai 1987 yang lalu, janji itu belum dapat saya penuhi. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan saya tetap berusaha memenuhi janji saya itu.

Pada waktu dilaksanakan Seminar Hari Lahirnya Kota Banda Aceh, bulan Maret 1988, Prof. A. Hasjmy menyampaikan pada saya bahwa semua sisa cetakan pertama konsep pidato saya itu sudah habis terbagikan, sedangkan permintaan masih tetap banyak dari berbagai pihak. Lebih-lebih lagi menghadapi Pekan Kebudayaan Aceh yang direncanakan bulan Agustus 1988 yang akan datang dirasa perlu mencetak ulang konsep pidato saya itu. Beliau meminta saya memeriksa kembali konsep tersebut dan menambahkan dengan pengantar saya supaya lebih dipahami secara utuh. Maka dalam penerbitan kedua ini konsep pidato saya itu dilengkapi dengan Pengantar dan Penutup, sedangkan isi pokoknya saya biarkan utuh seperti semula menunggu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sehingga perbaikannya kelak lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan ada di antara pembaca yang budiman bersedia menyampaikan kritik dan saran itu pada saya dan hal itu benar-benar sangat besar artinya bagi kita semua.

Banda Aceh, Darussalam, 26 Maret 1988

Anas Machmud

Isi

v
Mukaddimah

ix
Sepatah Kata

3
Sekedar Analisa Sejarah

11
Perjuangan Aceh
menunjukkan Ciri-ciri dan Identitas Nasional

17
Metodologi dan Tinjauan Sejarah Nasional
tentang Perang Aceh

25
Batas Pengertian
Perang Aceh dalam Sistematika Sejarah Nasional

33
Kristalisasi Kepemimpinan dalam Masyarakat Aceh
adalah Proses Demokratisasi menurut Ajaran Islam

39
Aceh tidak pernah
menyerahkan Kedaulatannya kepada Belanda

43
Perjuangan Bersenjata, Pergerakan Kemerdekaan,
dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia



Teuku Imeum Lueng Bata (duduk di sebelah kanan), Panglima Perang Aceh yang mempertahankan **Dalam** (Istana) Sultan Aceh pada waktu pasukan Belanda menyerbu untuk kedua kalinya.

Gambar ini dibuat di Pulau Pinang sebelum pecahnya peperangan, ketika beliau bersama Teuku Kali Malikon Ade' (duduk di sebelah kiri) memimpin sebuah perutusan ke sana dalam usaha menjajaki kemungkinan mendapatkan bantuan persenjataan.

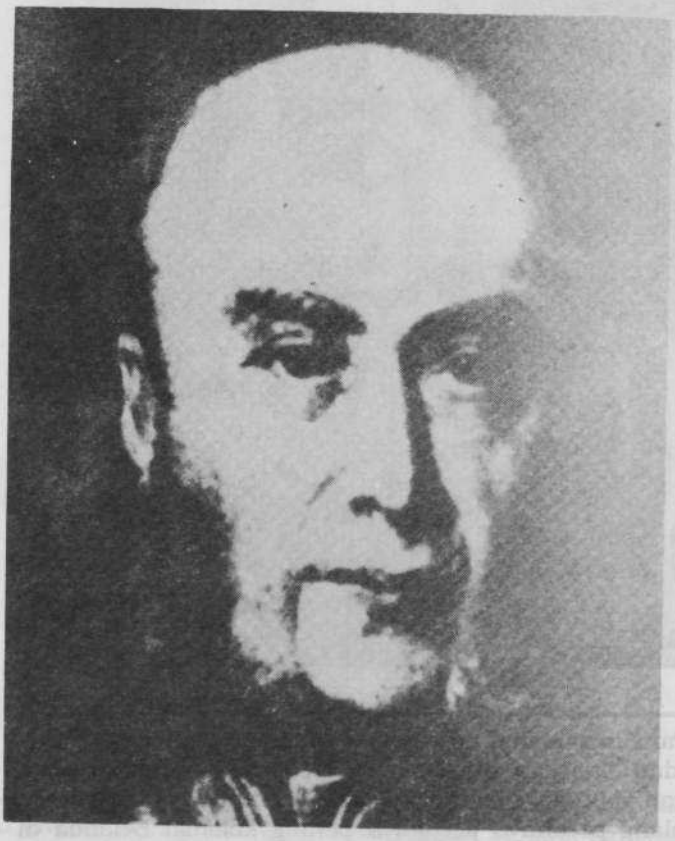
(Sumber: A. Reid, *The Contest for North Sumatra*, h. 312.)



Teuku Panglima Maharaja Tibang Muhammad, karena jasa-jasanya dan dianggap ahli diangkat menjadi Syahbandar Aceh oleh Sultan Mahmud Alauddin Syah.

Menjelang pecahnya ~~pecahnya~~ perang kolonial Belanda di Aceh, ia diutus ke Riau untuk berunding dengan pihak Belanda, dan dalam perjalanan pulang ia singgah di Singapura. Selaku ketua perutusan sebuah kerajaan yang merdeka, ia menghubungi perwakilan-perwakilan Amerika dan Italia guna mendapatkan bantuan untuk menghadapi Belanda. Tindakan ini dijadikan alasan oleh pihak Belanda untuk memerangi Aceh.

(Sumber: Paul van't Veer, *De Atjeh-oorlog*, h. 48; foto: Anonim, *Atjeh-onlusten in 1896*, h. 16.)



Mr. James Loudon, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1872—1873) yang mencetuskan kebijaksanaan untuk memerangi Aceh.

Kebijaksanaan ini mendapat tantangan di Negeri Belanda dengan tindakan pengunduran diri sejumlah Menteri Kabinet. Loudon pun akhirnya terpaksa meminta berhenti juga.

(Sumber: Paul van't Veer, *De Atjeh-oorlog*, h. 90; foto: Pierre Heijboer, *Klamboes, Klewangs, Klapperbomen*, h. 141.)



Tempat-tempat pendaratan pasukan Belanda yang pertama dan kedua di Aceh, masing-masing pada bulan April dan Desember 1873.

(Sumber: Paul van't Veer, *De Atjeh-oorlog.*)



Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, pemimpin pasukan Belanda yang pertama kali mendarat di Aceh pada tanggal 6 April 1873.

Pada tanggal 10 April 1873, pasukan Belanda merebut Masjid Raya, tetapi karena tekanan-tekanan yang diberikan oleh pejuang-pejuang Aceh, pada malam itu juga mereka terpaksa mundur.

Pada tanggal 14 April 1873 Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebutnya kembali dan berhasil pula menduduki Mesjid Raya, akan tetapi pada hari itu juga Kohler tewas karena tembakan penembak mahir pejuang Aceh sehingga seluruh rencana penyerbuan Belanda menjadi berantakan dan mereka mengundurkan diri.

Ucapan Kohler yang terkenal pada saat-saat maut merenggut jiwanya: *"O God, ik ben getroffen!"* ("Ya Tuhan, aku terkena peluru!"

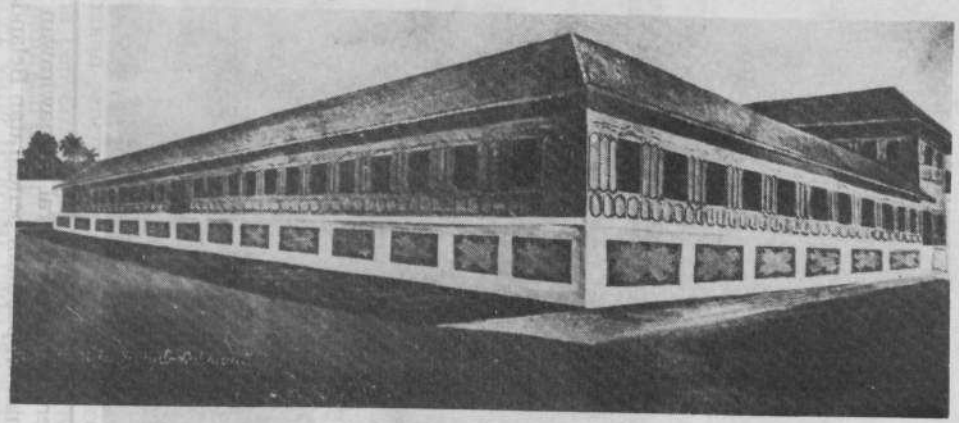
(Sumber: Pierre Heijboer, *Klamboes, Klewang, Klapperbomen*, h. 141, 142.)



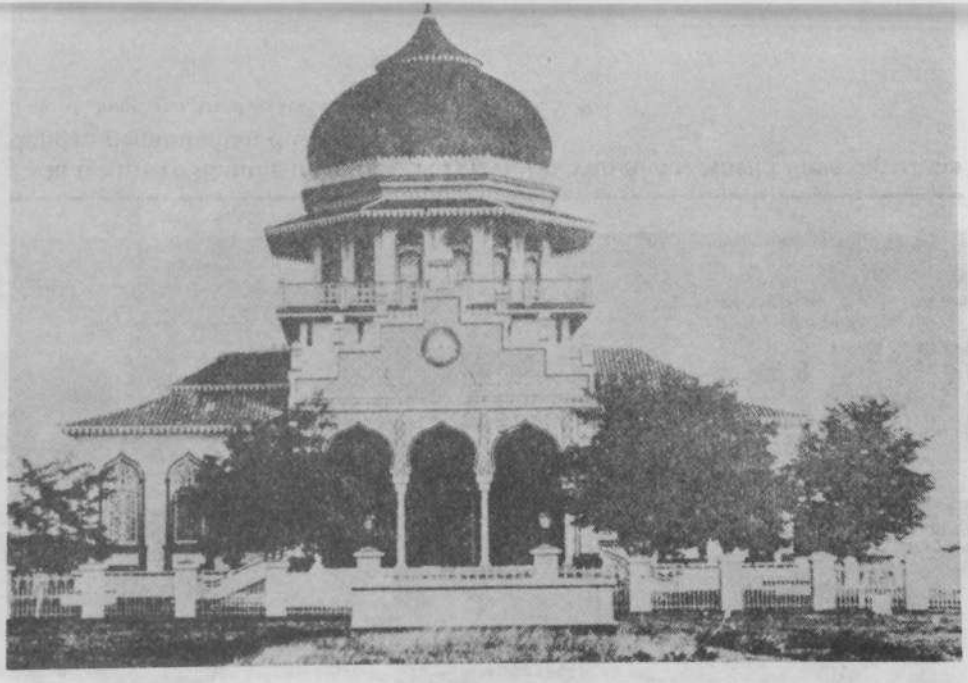
J. van Swieten, Letnan Jenderal purnawirawan yang diaktifkan kembali, pemimpin pasukan pendaratan Belanda yang kedua.

Ia memimpin penyerbuan Dalam (Istana) Sultan Aceh pada tanggal 24 Januari 1874 setelah pasukannya merebut kembali Masjid Raya pada tanggal 6 Januari 1874.

(Foto: *Kon. Inst. voor de Tropen*, Amsterdam.)

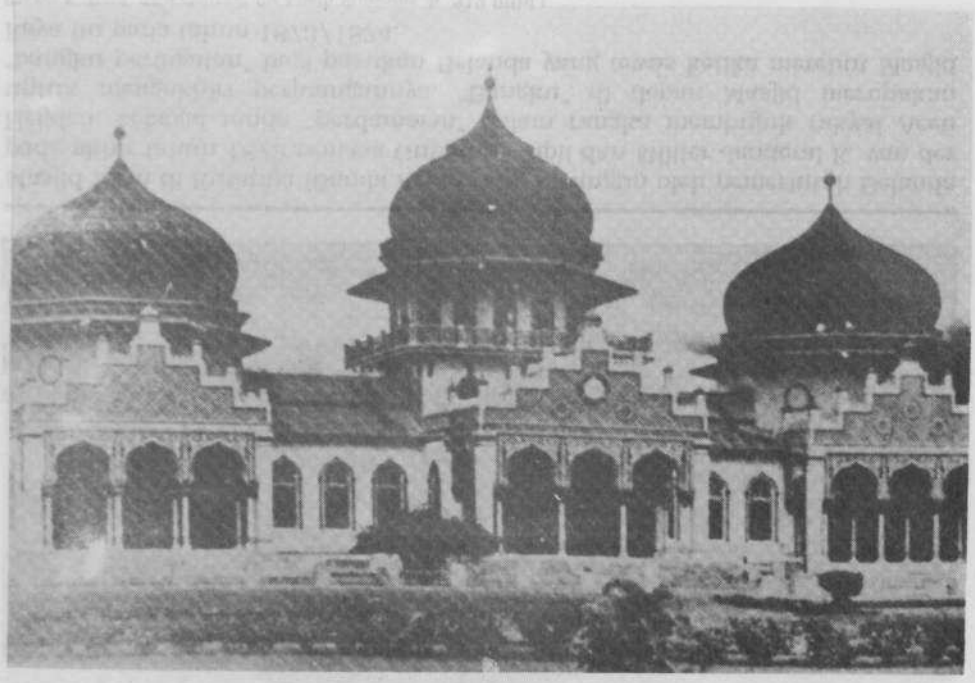


Masjid Jami Baiturrahman yang dibakar oleh meriam-meriam Belanda, setelah Mayor Jenderal Kohler mati di depannya oleh peluru pejuang Aceh yang terkenal. Mesjid ini, arsitekturnya seperti arsitektur Masjid Ibnu Toulon di Kairo, Mesir. Jami Baiturrahman, juga merupakan sebuah universitas terkenal.



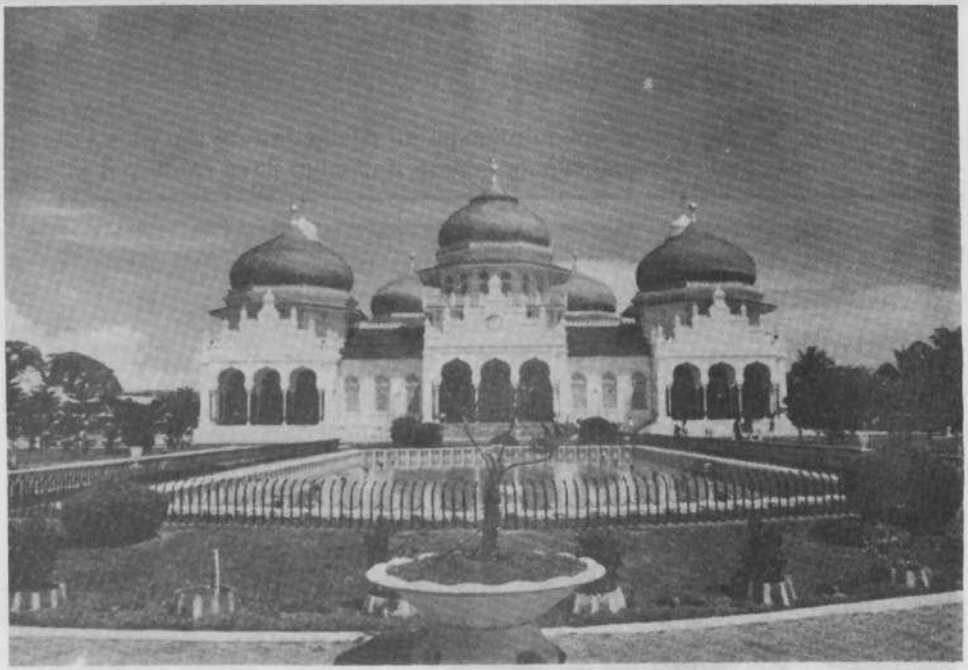
Masjid Raya di Kutaraja (Banda Aceh) yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada akhir tahun 1879 semasa Gubernur Sipil dan Militer Jenderal K. van der Heijden, sebagai tanda "perdamaian" dalam rangka membujuk rakyat Aceh untuk mengakhiri perjuangannya. "Bangku" di depan Masjid merupakan "bangku peringatan" bagi pasukan Belanda yang tewas ketika merebut Masjid Raya itu pada tahun 1873/1874.

(Foto: A. Reid, *The Contest for North Sumatra*, h. 312 [IIIb].)

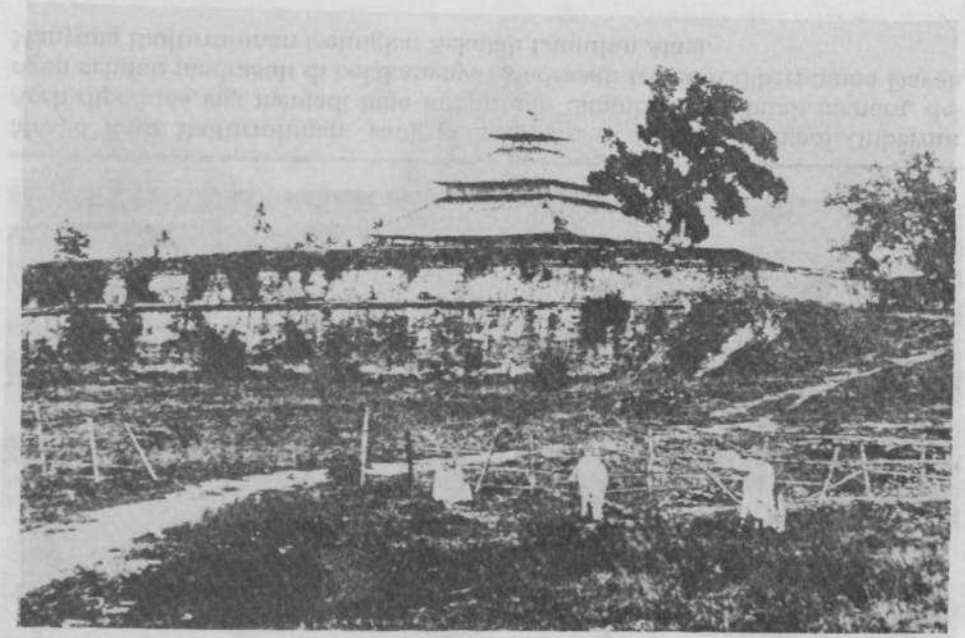


Pada tahun 1936, atas usaha Gubernur A. Ph. van Aken, Masjid Raya diperluas dengan penambahan dua buah kubah.

(Foto: J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh, vroeger en nu*, h. 4b.)



Masjid Raya Baiturrahman, yang pada waktu A. Hasjmy menjadi Gubernur Aceh diperluas lagi menjadi lima kubah dan ditambah dua buah menara, dengan sebuah madrasah di belakangnya. Madrasah tersebut diberi nama Dayah Manyang Baiturrahman (setingkat Sekolah Lanjutan Atas).



Masjid Indrapuri yang dibangun di atas fondasi sebuah candi besar yang bernama Candi Indrapura. Masjid ini dibangun pada zaman Sultan Iskandar Meukuta Alam.

KEDAULATAN ACEH YANG TIDAK PERNAH DISERAHKAN KEPADA BELANDA ADALAH BAHAGIAN DARI KEDAULATAN INDONESIA

Algemeen Rijksarchief
Tweede Afdeling

Rijksarchief voor de centrale regeringsarchieven vanaf 175

Pro Tuanku Abdul Jalil
31/8-1985

Tuanku Abdul Jalil,
Dinas Pariwisata Propinsi Aceh,
Jalan Lhoknga Lamteumen 106,
Banda Aceh, Indonesia.

uw brief 11 juli 1985 nummer D754/dG 's-Gravenhage 22 augustus 1985

onderwerp Korte verklaring
sultan van Aceh

Zeer geachte heer,

In antwoord op uw brief, die door het ministerie van Buitenlandse Zaken ter afhandeling aan mij werd overgedragen, bericht ik u, dat sultan Mohammad Daud Syah na zijn onderwerping aan het Nederlandse gezag op 10 januari 1903 niet werd hersteld in zijn sultanaat noch werd bekleed met enige andere bestuurlijke bevoegdheid. Dit is de reden dat hij geen Lange of Korte verklaring heeft getekend.

Omdat hij zich opnieuw met opstandige handelingen bezighield werd hij in 1907 naar Java verbannen. Ik voeg hierbij een kopie van het besluit van de gouverneur-generaal van 3 mei 1904 geheim nummer 1, waarin de beschikkingen ten aanzien van de ex-sultan werden vastgesteld.

Ik moge u er op attent maken, dat de in dit Besluit genoemde stukken allen te vinden zijn in het Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Amp Raya, Cilandak III, Jakarta. Daar zijn ook verdere stukken over sultan Mohammad Daud te vinden.

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn geweest.

Het Hoofd Externe Dienstverlening
van de Tweede Afdeling,

(mej. drs. F. van Anrooij).

POSTADRES: POSTBUS 90520 2509 LM 's-GRAVENHAGE BEZOEKADRES: PRINS WILLEM ALEXANDERHOF 20 's-GRAVENHAGE
TELEFOON: 070-814301 POSTGIRO: 507588 (NAAST HET CENTRAAL STATION)
VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM EN NUMMER IN BRIEFHOOFD TE VERMELDEN

SEKEDAR ANALISA SEJARAH

Ketika Prof. Muhammad Yamin (almarhum) menerima jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah dan Ilmu Hukum pada Universitas Pajajaran, Bandung, beliau telah menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul "Tinjauan Hukum dan Sejarah tentang Kedaulatan Indonesia Sepanjang Masa". Isi pidato itu sangat penting dijadikan landasan berpikir kita tentang pengertian Kedaulatan Indonesia yang mengalami pasang naik turunnya sepanjang sejarah bangsa kita. Kedaulatan itu hak yang bulat, tak dapat dibagi dan tak dapat dipindahkan dari yang berhak. Jika pemerintahan negara tumbuh dan berkembang, maka kedaulatan itu berkembang pula ibarat payung melindungi dan membahagiakan yang empunya kedaulatan itu yaitu rakyat Indonesia. Sebaliknya jika kekuasaan pemerintahan negara susut, misalnya akibat tekanan keangkara-murkaan kekuatan kolonialis, maka kedaulatan itu kuncup sehingga kita tidak punya pelindung, begitu pula tanah tumpah darah kita serta segala kekayaan yang ada di dalamnya. Tentu semua itu tidak dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan kita semua. Hal itu akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Oleh sebab itulah kita tidak putus-putusnya berjuang menegakkan kedaulatan bangsa kita melawan penjajahan.

Jika kita pahamkan dari *sunatullah*, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka nilai ukuran yang tertinggi kedaulatan itu terletak pada cara setiap insan manusia mengatur hidup dirinya sendiri, cara mengatur hidup bersama, baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan besar, cara mengatur lingkungan alamnya sebagai khalifah di bumi untuk kesejahteraan hidupnya

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang Maha Adil, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Lingkungan kecil misalnya keluarga, desa, daerah; sedang lingkungan besar itu adalah bangsa dan antar-bangsa. Selanjutnya agama Islam mengajarkan bahwa kesempurnaan hidup bersama itu ialah dalam lingkungan berbangsa. Fitrah manusia dijadikan berbangsa-bangsa itulah yang memungkinkan kita saling mengenal, saling memberi dan menerima, saling bersahabat. Dalam kedudukan demikian itulah kedaulatan menjadi sempurna dan setiap warganegara akan menjadi terhormat karena dapat mengembangkan kehidupannya secara wajar, berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Selanjutnya filosof sejarah Jerman yang terkenal, Georg Wilhelm Friederich Hegel mengajarkan pada kita bahwa pada diri manusia itu ada ruh yang selalu mengejar ruh yang mutlak (*geist*) dan inilah yang menggerakkan sejarah, sebab rohaninya manusia itu tidak tenteram sebelum ruh perseorangan mencapai martabat yang tinggi dan martabat yang tinggi itu akan tercapai setelah kehidupan bersama itu terwujud dalam kehidupan berbangsa.

Mudah dipahami kiranya mengapa dalam sejarah bangsa kita pada zaman dulu terjadi saling hubungan (interaksi) yang tidak damai, antar individu, antar desa, antar kerajaan daerah. Hal itu disebabkan tidak adanya ketenangan rohani bangsa kita. Rohani bangsa Indonesia pada masa sejarah zaman lampau itu belum menemukan sistem kehidupan yang fitrah baginya yaitu sistem negara kebangsaan. Dalam sistem negara kebangsaan yang merdeka bersatu, berdaulat adil dan makmur seperti sekarang inilah bangsa Indonesia akan mempunyai arti yang sesungguhnya, punya nilai dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Dalam kehidupan kenegaraan seperti itu pulalah setiap insan Indonesia dapat mengembangkan hidup pribadinya secara layak, secara adil mengejar kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang diridhoi Allah SWT.

Oleh sebab itulah peperangan-peperangan yang terjadi antara sesama bangsa Indonesia sepanjang sejarah, antara kerajaan dengan kerajaan di Nusantara adalah proses unifikasi, proses persatuan sepanjang sejarah untuk mewujudkan diri sebagai suatu bangsa yang dilindungi satu negara, yaitu negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat. Hal itu berbeda dengan peperangan-

peperangan yang dilakukan terhadap kekuasaan asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Hendaknya dapat kita memahamkan bahwa peperangan menghadapi kekuasaan asing itu tak lain perjuangan mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa melawan ketidak-adilan, keangkara-murkaan, ketamakan kaum kolonial itu. Pada waktu masuknya kekuatan kolonialisme Portugis ke Indonesia pada permulaan abad ke-16 negeri kita terpecah-belah atas beberapa kekuasaan-kekuasaan kecil di atas reruntuhan kekuasaan Majapahit. Oleh sebab itulah jawaban sejarah yang paling tepat, yang dilakukan tepat, menghadapi ancaman Portugis itu adalah konsolidasi kekuatan nasional dengan landasan Islam dan struktur penyatuan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan raja-raja atau sultan-sultan yang kuat. Hal itulah yang dilakukan Demak, Pajang, dan Mataram di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, hal yang demikian jugalah yang diperankan oleh Banten di Jawa Barat, oleh Makassar di Sulawesi, dan oleh Aceh di Sumatera. Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Sultan Trenggono dari Demak, Sultan Agung Anykrokusumo dari Mataram, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sultan Ali Mukhayat Syah dari Aceh yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandarmuda Darmawangsa Tun Pangkat terbesar Kerajaan Aceh yang berpusat di Banda Aceh Darussalam sering disebut penaklukan-penaklukan. Terminologi penaklukan tidak tepat menurut alur sejarah bangsa kita, tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yang hakiki, karena yang dilakukan itu tak lain adalah konsolidasi kekuatan nasional dengan jalan penyatuan kekuatan fisik dan ideologi. Islam pada waktu itu ideologi yang mampu menyatukan sebagai jawaban kekuatan ideologi kolonial. Dalam pengertian Islam pada waktu itu termuat fikiran-fikiran kebangsaan, anti penjajahan, sifat kerakyatan, keadilan sosial yang diridhoi Allah SWT. Dengan landasan itulah kerajaan-kerajaan yang disebut tadi berjuang menegakkan kedaulatan bangsa, mengembangkan payung untuk melindungi segenap bangsa kita dan tanah tumpah darah kita. Perjuangan rakyat Indonesia di bawah pimpinan raja-raja itu berlangsung sepanjang abad ke-16 Portugis dan Spanyol, kemudian abad ke-17 menghadapi Belanda. Pada abad ke-19 kepemimpinan raja-raja itu dalam perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia tidak

dapat dipertahankan, karena raja-raja mengaku takluk dan menanda-tangani perjanjian perdamaian dengan Belanda. Namun perjuangan terus dilakukan oleh ulama dan bangsawan seperti Kraeng Gallesung, Trunojoyo, Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain-lain. Tetapi ada juga raja-raja yang terus berjuang dan tidak bersedia takluk, terus berjuang memimpin perlawanan rakyat.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia tercatat Aceh, atau Kesultanan Aceh, satu-satunya Kerajaan Islam yang mampu terus mempertahankan kedaulatannya sampai abad ke-20 ini. Berarti, untuk Aceh, payung kedaulatan itu masih berkembang dan Sultan tetap berada di puncak kepemimpinan negara sebagai pemangku kedaulatan itu. Masa yang panjang, abad ke-17 sampai abad ke-20, telah berhasil memantapkan landasan ideologi yang kuat, sehingga kepemimpinan rakyat berakar pada lapisan yang paling bawah. Jika di daerah-daerah lain di Nusantara kepemimpinan itu silih berganti, mulai dari kepemimpinan perlawanan di bawah kekuasaan raja-raja, kemudian dilanjutkan oleh para bangsawan dan ulama, seterusnya dilanjutkan oleh kepemimpinan rakyat lapisan paling bawah, maka di Aceh—secara fisik dan mental—kepemimpinan itu secara serentak muncul ke permukaan dalam Perang Aceh. Kekuatan mental dilandasi Islam yang berisi nilai-nilai kemerdekaan, kebangsaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan itu telah berakar demikian dalam pada lubuk hati setiap insan di daerah ini. Tanggung jawab untuk memikul beban menegakkan kedaulatan tidak bertumpu pada Sultan saja melainkan pada seluruh lapisan masyarakat. Hal itulah yang tidak diperhitungkan Belanda ketika memulai agresi-nya tanggal 26 Maret 1873. Ini dapat dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan berikut.

Dalam bulan Januari 1874 pasukan Belanda berhasil merebut istana dan menghancurkan Mesjid Baiturrahman. Bagi Jenderal van Swieten yang memimpin serangan itu konsep istana dianggap sama dengan "kraton" atau *"dalem"* yang mengandung tuah atau semangat kedaulatan. Oleh sebab itu, ketika Belanda berhasil menduduki pusat pemerintahan itu, van Swieten mengumumkan bahwa Aceh sudah ditaklukkan. Bagi rakyat Aceh istana sebagai tempat bersemayam Sultan memang bukan tempat biasa, tempat itu tersendiri namun sebagai Muslim yang terbina

keimanannya dan kekuatan mental spiritualnya, istana bukan sesuatu yang keramat. Ulama-ulama kenamaan dalam Kerajaan Aceh Darussalam sepanjang sejarah telah memberikan kajian-kajian agama yang tinggi, baik dari hukum *fiqh* kehidupan sehari-hari, kenegaraan, keimanan sampai pada falsafah dan tasawwuf yang tiada tolok bandingnya. Sebagai muslim sejati Sultan memimpin perjuangan di luar istana dan mangkat dalam masa pertempuran itu. Selanjutnya, ketika Sultan Alaiddin Muhammad Daudsyah ditawan Belanda pada tahun 1903, Belanda kembali menyatakan kedaulatan Aceh sudah jatuh ke tangan Belanda. Sebagai masyarakat yang berperadaban (*tamaddun*) tinggi yang dijiwai ruh Islam, rakyat Aceh—baik ulama maupun bangsawan dan rakyat biasa—menyadari kedudukan Sultan yang tinggi. Namun mereka juga menseimbangkan kedudukan yang tinggi itu dengan segi kehidupan manusia biasa. Rasa *ukhuwah* yang sangat mendalam menjauhkan mereka dari persangkaan buruk dan berkeyakinan bahwa Sultan, dalam keadaan bagaimana pun, tidak akan menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda dan tetap akan berjuang dalam keadaan apa pun yang dihadapi, walaupun berada dalam tawanan.

Di bawah pimpinan para panglima dan ulama, rakyat Aceh meneruskan perjuangan terus menerus dan menuju perang gerilya dan perang rakyat. Yang dimaksud dengan perang rakyat itu tak lain dari perlawanan seluruh rakyat, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak, mengambil bagian dalam peperangan itu. Tentu saja masing-masing pihak akan melakukan peran dalam peperangan itu sesuai dengan kemampuannya, baik aktif maupun pasif, namun semua dijiwai ruh kemerdekaan, kecintaan pada nusa dan bangsa sesuai dengan ajaran agama Islam. Keberadaan Sultan dalam tawanan di Banda Aceh memberi semangat dan malahan ada bukti-bukti bahwa Sultan berperan untuk meningkatkan perang rakyat sehingga pusat kedudukan Belanda di "Kutaraja" yang selama ini dianggap paling aman mendapat serangan rakyat. Menyadari besarnya pengaruh Sultan di tengah masyarakat Aceh akhirnya Belanda membuang Sultan, dan Sultan mangkat dalam pembuangan pada tahun 1939.

Tindakan Sultan yang terus berupaya melakukan berbagai usaha dalam tawanan Belanda itu membuktikan bahwa Sultan

tidak menyerahkan kedaulatan kepada Belanda, melainkan mengembalikannya kepada yang hak, yaitu seluruh lapisan masyarakat dan seluruh rakyat.

Perang rakyat di Aceh tidak pernah berakhir sampai pendudukan Jepang pada tahun 1942. Dewasa ini kuburan tentara Belanda di Banda Aceh Darussalam menjadi bukti perlawanan rakyat itu. Pada daftar yang tertera di depan kuburan itu dapat dilihat pasukan-pasukan Belanda yang menjadi korban perang rakyat lengkap dengan tanggal dan tempat pertempuran yang dihadapinya. Hal itu berarti bahwa rakyat Aceh telah menerima kedaulatannya dari Raja yang tidak lagi berdaya memberi perlindungan, oleh sebab itu mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Inilah kebangkitan semangat kerakyatan yang membangkitkan simpati dan inspirasi para pemimpin bangsa dari seluruh pelosok tanah air kita. Jarum Sejarah Nasional Indonesia telah menunjukkan masa kebangkitan nasional, bangkitnya rasa persatuan yang sejajar dengan bangkitnya rasa kerakyatan untuk mengejar keadilan dan keridhoan Allah SWT.

Kebanggaan kita pada pahlawan-pahlawan Aceh bukan kebanggaan daerah yang sempit melainkan kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Dipertahankannya kedaulatan Aceh sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan seluruh rakyat Indonesia menjadi mata-rantai dalam sejarah perjuangan seluruh bangsa kita.

Belajar dari sejarah masa lampau maka pada tahun 1945 sebagai titik kulminasi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia yang mampu memberi perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mengejar kebahagiaan lahir dan batin disambut hangat oleh seluruh daerah dan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 terwujudlah keinginan rohani yang paling dalam seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk dirinya menjadi satu bangsa yang sederajat dan bersahabat dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Itulah sebabnya rakyat Aceh berada pada barisan paling depan dalam perjuangan kemerdekaan itu, dan daerah Aceh adalah daerah yang paling siap dalam menghadapi segala ancaman agresi Belanda sehingga Belanda tidak berani mengin-

jakkan kakinya di Tanah Rencong itu selama perang kemerdekaan. Bujukan van Mook untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dalam masa perang kemerdekaan itu tidak mendapat sambutan rakyat, sehingga Aceh tetap menjadi daerah modal dalam masa perang kemerdekaan itu.

oooOooo

PERJUANGAN ACEH MENUNJUKKAN CIRI-CIRI DAN IDENTITAS NASIONAL

Dengan memanjatkan syukur ke hadhirat Allah Yang Maha Kuasa, dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh, saya akan menyampaikan sebuah ceramah ilmiah dalam rangka Peringatan 110 Tahun Pecahnya Perang Aceh 26 Maret 1873 - 26 Maret 1983. Oleh Pimpinan Majelis Ulama, saya ditugaskan untuk membahas topik *"Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda"*.

Saya menilai bahwa apa yang dinyatakan dalam judul di atas adalah kebenaran sejarah yang dapat dibuktikan secara ilmiah, oleh sebab itu tugas tersebut saya terima dengan senang hati sebagai amal bakti saya kepada nusa dan bangsa.

Sebagaimana layaknya sebuah ceramah yang singkat dan berisi, maka pada kesempatan ini saya hendak menuangkan terlebih dahulu kerangka tafsiran sejarah dari semua kejadian-kejadian yang telah berlalu sesuai dengan falsafah sejarah nasional. Kejadiannya itu sendiri, baik yang menyangkut nama-nama orang, tempat, waktu, serta peristiwa-peristiwa yang tak terhitung banyaknya mudah-mudahan pada lain kesempatan dapat dituangkan dalam kerangka fikiran ini dalam bentuk karya yang lebih besar.

Pembahasan dari sudut falsafah sejarah nasional adalah sesuai dengan bidang keahlian saya dan keyakinan saya. Saya yakin, bahwa di antara kenyataan-kenyataan sejarah yang berupa fakta dengan ilmu sejarah terbuhul kebenaran sejarah yang harus diuraikan dengan akal budi yang dipimpin dengan selurus-lurus-

nya oleh budi pekerti yang luhur untuk kepentingan generasi kita sekarang maupun untuk anak-cucu kita di belakang hari.

Lain dari itu kita semua yang hadir di sini telah bersepakat dalam "Seminar Perjuangan Aceh sejak 1873 sampai dengan Kemerdekaan Indonesia" yang dilaksanakan tepat sepuluh tahun yang lampau di kota Medan. Seminar itu telah mewasiatkan kepada kita agar "penulisan sejarah perjuangan Aceh harus menunjukkan ciri-ciri dan identitas nasional, artinya harus ditilik dari sudut perjuangan bangsa, prinsip mana harus diperkuat dengan usaha menyusun kembali tulisan sejarah yang ada sebelumnya, yang umumnya masih dipengaruhi oleh penulis-penulis kolonial".

Demikianlah peringatan kita malam ini tak lain dari satu usaha membangun dan memperkuat persatuan bangsa untuk tercapainya cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di dalam ceramah ini akan dibahas hakikat dan kedaulatan Aceh sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kedaulatan bangsa Indonesia dan akan dibuktikan kedaulatan itu tidak pernah diserahkan kepada Belanda. Perjuangan rakyat Aceh adalah perjuangan menjunjung tinggi kedaulatan bangsa sambung bersambung dengan tidak putus-putusnya sejak Perang Aceh 1873 sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kedudukan Aceh sebagai wilayah terakhir di Indonesia yang berjuang dengan segala cara mempertahankan kedaulatan telah memperkuat: kedudukan pengertian Aceh sebagai daerah modal bagi perang kemerdekaan mempertahankan Negara dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Batas Pengertian Kedaulatan

Kata "daulat" berarti raja, kepala negara yang tertinggi. Dalam budaya bangsa kita pada zaman dulu dikenal juga kata *"datau"*, *"isywara"* dan *"prabu"* untuk kepala negara yang tertinggi itu. Dalam kaitan pengertian "raja berdaulat" terkandung arti kedudukan raja yang tertinggi yang membawahi raja-raja lain di negerinya. Demikianlah pengertian yang terkandung pada "Daulah Umaiyah" atau "Daulah Abbasiyah" berarti kekuasaan raja-raja dinasti Muawiyah atau raja-raja dinasti Abbasiyah yang mengatasi semua kekuasaan kepala negara (*Amir*) yang ada di wilayah pengaruh dinasti itu. Kata *"souverainete"* dalam bahasa Prancis

berasal dari kata dalam bahasa Latin *"superanus"*, yaitu raja atau kepala negara yang tertinggi.

Perkembangan sejarah dan pertumbuhan budaya bangsa Indonesia sepanjang sejarah tetap mempertahankan kata "kedaulatan", tetapi tidak isi yang dikandungnya, atau tidak selalu berisi di dalamnya kekuasaan tertinggi yang ada di tangan raja. Kedudukan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sejarah Indonesia tidak tinggal tetap, melainkan berubah sepanjang kesadaran hukum yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan yang terus menerus terjadi hasil perjuangan memajukan derajat hidup manusia telah mengangkat derajat rakyat Indonesia. *Kedudukan sebagai "hamba", "sahaya", yang pada zaman dahulu berada di bawah duli "Yang berdaulat", setahap demi setahap ditingkatkan sesuai dengan harkat hidup manusia yang mengakui persamaan derajat manusia.* Maka setelah kita bangsa Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 kata "Kerakyatan" telah mendapat tempat yang mulia mengisi lembaran Konstitusi Republik Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedaulatan menurut hukum nasional Indonesia ialah:

> "wewenang tertinggi berdasarkan kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam perihal berkebebasan penuh melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan mengendalikan kebijaksanaan luar negeri"[1]

Dalam kaitan topik ini, maka yang disebut Kedaulatan Aceh ialah wewenang tertinggi Kerajaan Aceh sebagai salah satu Kerajaan Nasional Indonesia yang merdeka untuk berkebebasan penuh melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan mengendalikan kebijaksanaan luar negeri.

Hakikat Perang Aceh

Pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia menuntut ultimatum dan disampaikan oleh Komisaris Tinggi yang diutusnya, Nieuwen Huyzen, pada tanggal 26 Maret 1873, agar

1. Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *Tinjauan Hukum dan Sejarah tentang Kedaulatan Indonesia Sepanjang Masa*, Kementerian Penerangan RI, Penerbitan Khusus Nomor 28, hal. 8.

Aceh mengakui kedaulatan Sribaginda Raja Belanda. Hal itu berarti Aceh harus memilih satu di antara dua, yaitu menyerahkan kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan kebijaksanaan luar negeri kepada pemerintah Hindia Belanda, atau berperang mempertahankan kemerdekaannya. Untuk jelasnya baiklah dikutipkan sebahagian ultimatum itu yang berisi:

> "... Andainya Sripaduka Tuanku tidak bersedia mengakui kedaulatan Sribaginda Raja Belanda atas negeri Aceh maka dengan tidak dapat ditarik kembali akan dipertimbangkan berlangsungnya penyerangan, dengan mana saja, kecuali menggunakan kapal-kapal perang yang sudah berada semula di sini, juga dalam beberapa hari saja akan diperlengkapi dengan kekuatan bersenjata yang amat hebat yang didatangkan dari Betawi.
>
> Saya peringatkan pada Sripaduka Tuanku, bahwa penyerangan yang akan saya mulai itu hanya akan dapat saya tangguhkan jika Sripaduka Tuanku mengusahakan sedemikian rupa sehingga pantai dibersihkan dari penduduk bersenjata, segala kegiatan yang dilakukan di benteng-benteng dihentikan dan tidak akan dilakukan pembinaan benteng-benteng baru ..."[2]

Sikap Aceh terhadap ultimatum itu tegas menolak sebagaimana dinyatakan dalam surat Sultan:

> "... Mengenai permakluman, yang dimaksud dalam surat kita kemarin itu isinya tidak lain dari daripada mengemukakan bahwa dari pihak kita tidak ada tumbuh sedikit pun keinginan untuk merubah hubungan persahabatan yang sudah diikat. Sebab kita hanya seorang miskin dan muda, dan kita juga sebagai Gubernurmen Hindia Belanda berada di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa."[3]

Pernyataan yang demikian itu jelas membuktikan, bahwa ancaman peperangan tidak merubah sikap Sultan, sehingga dengan tegas dinyatakan "tidak sedikit pun tumbuh niat atau keinginan" walaupun sudah mendengar berbagai ancaman itu untuk mengubah status Aceh dari negara yang merdeka dan berdaulat menjadi

---

2. Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan, 1981, hal. 745.
3. *Ibid.*, hal. 737-748.

negeri jajahan. Hakekat Perang Aceh itu tak lain dari perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa dari ancaman angkara murka penjajahan.

oooOooo

METODOLOGI DAN TINJAUAN SEJARAH NASIONAL TENTANG PERANG ACEH

Penulisan dan penguraian sejarah adalah karya normatif, bertujuan menggali dan melukiskan peristiwa-peristiwa sejarah dengan setepat-tepatnya untuk kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang. Oleh karenanya penulisan Sejarah Aceh harus ditegakkan dalam kerangka Sejarah Nasional dengan berasaskan Falsafah Sejarah Nasional demi cita-cita keutuhan bangsa.

Penulisan sejarah perjuangan Aceh harus menunjukkan ciri-ciri dan identitas nasional, artinya harus ditinjau dari sudut kepentingan perjuangan bangsa, prinsip mana harus diperkuat dengan usaha penyusunan kembali tulisan sejarah yang ada sebelumnya yang pada umumnya dipengaruhi oleh penulis-penulis kolonial.[4]

Dalam sudut pandangan yang demikian itu, maka Sejarah Aceh adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Sejarah Nasional, dan sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam uraian berikut akan diuraikan dari sudut pandangan Sejarah Nasional Indonesia, bahwa *Aceh sebagai salah satu Kerajaan Nasional pada abad ke-19 di Nusantara berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia dan tidak pernah menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia kepada Belanda.*

---

4. Kesimpulan Seminar Sejarah Perjuangan Aceh sejak 1873 sampai Kemerdekaan Indonesia, Medan, bidang III.6, a dan b.

Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia Sepanjang Sejarah

Negara yang merdeka adalah tempat tegaknya kedaulatan bangsa itu. Maka kedaulatan dalam peri kehidupan budaya bangsa sudah ada sejak bangsa kita mengenal kehidupan "bernegara". Bentuk-bentuk negara yang *tertua seperti "Republik Desa", berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan besar di seluruh Nusantara yang sejak tanggal 17 Agustus 1945 mencapai bentuknya yang paling sempurna dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat.*

Bangsa kita pada zaman bahari adalah bangsa yang merdeka. Raja-raja di negeri kita pada zaman itu adalah tampuk pemerintahan yang berdaulat yang dipatuhi oleh rakyatnya sepanjang menjalankan pemerintahan sesuai dengan norma yang berlaku dan didukung oleh nilai-nilai luhur yang dihormati masyarakat. Begitu pula kedaulatan itu dihormati oleh bangsa-bangsa lain, baik waktu bangsa lain itu datang ke negeri ini maupun waktu utusan negeri kita berkunjung ke negeri asing. Itulah buah kemerdekaan berupa kedaulatan yang tak lain adalah *wewenang tertinggi berdasarkan kemerdekaan dalam perihal berkebebasan penuh melaksanakan pemerintah dalam negeri dan mengendalikan kebijaksanaan luar negeri.*

Kebijaksanaan yang demikian itulah yang dimilki Kerajaan-kerajaan Ta-ce, Co-po, dan Ho-ling yang sekitar permulaan tarikh Masehi disebut ada di negeri kita dan telah berhubungan dengan Cina, India, dan Arab. Kedaulatan yang demikian itulah yang dimiliki oleh Kerajaan-kerajaan Melayu, Tulang Bawang, Lamuri, Aru, Tarumanegara, Kutai, dan lain-lain kerajaan yang tidak tersebut dalam sejarah yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kedaulatan yang demikian pulalah yang dimiliki oleh Pajajaran, Medang Mataram, dan Majapahit. Semuanya dalah negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Semuanya adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan mengibarkan tinggi-tinggi panji-panji kedaulatan bangsa. Setelah Majapahit runtuh, kedaulatan bangsa Indonesia itu tidak turut runtuh. Susunan baru negara yang merdeka tempat tegaknya kedaulatan muncul di antara Demak, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, Palembang, dan Aceh.

Sampai datangnya bangsa-bangsa Barat ke negeri kita yang dengan sengaja secara sistimatis meruntuhkan kedaulatan bangsa Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedaulatan itu adalah milik bangsa Indonesia sendiri, tidak dapat diserahkan kepada bangsa lain. Negara dapat runtuh, tetapi kedaulatan tidak dapat hilang. Dalam keadaan negara runtuh panji-panji kedaulatan bangsa tidak dapat ditegakkan, marwah bangsa jatuh dan tidak dapat hidup di alam kebangsaan bebas. Begitu pula di alam penjajahan, pemerintah bangsa sendiri tidak mampu melindungi warganya. Putus tali tempat bergantung, terlemparlah warga ke lembah kehinaan sebagai bangsa yang dihinakan dalam pergaulan hidup di dunia. Panji-panji kemerdekaan tidak berkibar lagi, payung kedaulatan tidak melindungi lagi, menangis meratap tidak ada gunanya. Maka tersimpanlah pusakan lama, kebesaran zaman yang lampau, disematkan dalam hati sanubari, berupa petuah yang suci, menjadi pendorong cita-cita menjadi obor pemandu, mencari jalan dan usaha berjuang untuk Indonesia merdeka.

Demikianlah pengertian kedaulatan bangsa itu tersemi bersama budaya bangsa Indonesia, mengikat bangsa Indonesia dengan tanah tumpah darahnya dan tidak dapat diserahkan kepada bangsa lain manapun. Tidak pula kedaulatan itu mengenal daluwarsa, cepat atau lambat kedaulatan itu menghendaki agar dikibarkan tinggi-tinggi, tetapi bila keadaan tidak memungkinkan dia akan tetap bersemi di dalam hati.

Sekarang sampailah kita pada satu jawaban yang penting mengenai *adakah* penyerahan kedaulatan oleh Aceh kepada Belanda *atau tidak*. Jawabannya tegas, *tidak ada*. Sekiranyapun Sultan pada waktu ditawan menanda-tangani penyerahan kedaulatan kepada Belanda - Alhamdulillah, hal itu tidak pernah terjadi —*kedaulatan Aceh tidak akan dapat dipindah-tangankan kepada bangsa asing mana pun, sebab bangsa Aceh itu terbuhul; terikat erat menjadi satu dengan kedaulatan bangsa Indonesia yang akarnya terhunjam dengan teguh dalam naluri seluruh rakyat Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.*

Mari kita lihat sebagai perbandingan di berbagai kerajaan lain di Nusantara yang raja-rajanya menanda-tangani "penyerahan kedaulatan" kepada Belanda. Benarkah kedaulatan itu dapat

diserahkan? Benarkah rakyat mematuhi penyerahan itu? Ketika Sultan Ternate dan Tidore menanda-tangani kontrak dengan Kompeni pada abad ke-17 rakyat tetap melakukan perlawanan di bawah pimpinan Kakiali dan Teluka Besi, kemudian pada permulaan abad ke-19 di bawah pimpinan Thomas Matulessi. Mengapa jauh-jauh, di Mataram saja ketika Sultan Amangkurat II membuat perjanjian dengan Belanda, maka rakyat Mataram bangkit melakukan perlawanan di bawah pimpinan Trunojoyo, kemudian setelah Perjanjian Gianti yang merobek-robek Mataram menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Diponegoro bangkit memimpin perlawanan. Demikian sekedarnya dapat difahami bahwa *arti perlawanan itu yang penting ialah menunjukkan bahwa penyerahan kedaulatan itu tidak sah dan rakyat tidak menyetujuinya.* Begitu pula ketika Sultan Hasanuddin mengikat perjanjian dengan Belanda, Kraeng Gallesung meneruskan perlawanan; ketika Banten berbuat hal yang sama, Pangeran Purbaya dan Surapati bangkit memimpin perlawanan rakyat dan seterusnya adalah cerita yang panjang. Keistimewaan di Aceh tentunya karena Sultan sendiri tidak melakukan penanda-tanganan penyerahan kedaulatan itu, melainkan bersama-sama rakyat melakukan perlawanan. Selama dalam tawanan, Sultan tetap melakukan perlawanan dan tidak pernah menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia pada Belanda.

Aceh tumbuh dan berkembang menjadi Negara yang Berdaulat

Sesungguhnya telah beberapa kerajaan tumbuh dan tenggelam di seantero wilayah Aceh sebelum negeri tumbuh sebagai negeri yang berdaulat dan berkuasa besar pada abad ke-16. Untuk kita sebut misalnya Lamuri, Perlak, Pasei, Samudera, kemudian Pedir. Jika ditanyakan kepada kita mengapa Aceh yang pada mulanya kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh Pedir menjelma menjadi negara besar yang megah, jawab yang diberikan orang dapat berbeda-beda. Walaupun jawaban itu mengandung banyak kebenaran, seperti letaknya yang strategis; berada pada jalan perdagangan yang ramai; banyaknya pedagang-pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka ke sana dan sebagainya; namun jawaban itu belum sampai kepada jawaban yang benar hakiki.

Sesungguhnya Aceh tumbuh dan besar sejak abad ke-16 adalah karena kesediaannya memikul tanggung-jawab membela ke-

daulatan bangsa. Kesediaan menerima tugas sejarah, berjuang menegakkan kedaulatan bangsa berdasarkan kemerdekaan bangsa. Desakan kolonialisme Portugis yang datang pada abad ke-16 itu yang meruntuhkan kedaulatan Nusantara dengan menduduki Malaka pada tahun 1511, menghendaki *jawaban berupa cinta tanah air, kesediaan berkurban untuk kedaulatan, mematuhi pemerintahan yang benar dari seluruh rakyatnya.* Semua syarat itu ditambah dengan persyaratan yang disebutkan di atas ada pada negeri Aceh.

Tidakkah ada cinta Tanah Air dan kesediaan berkurban itu pada negeri-negeri yang disebutkan di atas tadi? Tentu ada. Tetapi Aceh di bawah pimpinan Sultan Ali Mukhayat Syah jauh lebih dipatuhi rakyatnya dibanding dengan negeri-negeri lain di sekitarnya. Begitulah Aceh menjelma menjadi negeri besar justru karena kesediaannya membela kedaulatan bangsa, menegakkan panji-panji kebesaran bangsa Indonesia.

Kebenaran akan cerita ini akan kita buktikan bersama. Bukankah setelah Portugis menduduki Malaka mereka membuat hubungan dengan Pidie dan Pasei? Bukankah Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun menjadi besar itu pada abad ke-14 masih merupakan negeri yang belum diperhitungkan di daerah ini? Bukankah dahulunya Perlak, Samudera, dan Pedir itu lebih penting kedudukannya dibanding dengan Aceh Darussalam? Pada mulanya Aceh Darussalam itu tunduk kepada Pidie, lalu Sultan Ali Mukhayat Syah membebaskan negeri itu dari Pidie. Mengapa mungkin kejadian itu? Pintar dan kuat benarkah Sultan Ali Mukhayat Syah itu? Betul tak dapat diingkari bahwa beliau adalah seorang yang teramat pintar pada masanya. Tetapi kepintaran beliau yang paling besar ialah melihat tugas sebagai pengemban kedaulatan bangsa. Demikianlah ketika Sultan Ali Mukhayat Syah dari Pidie mengikat perjanjian dengan Portugis, dan Portugis mendirikan benteng di negeri itu, maka saatnya sudah tiba bagi kehancuran Pidie. Menurut ajaran kesetiaan kepada tanah air dan solidaritas bangsa serta agama kesalahan itulah yang menyebabkan rakyat Pidie tidak patuh pada rajanya. Tidak heran pula kiranya kita melihat Sultan Ali Mukhayat Syah yang perkasa itu dijunjung tinggi oleh rakyatnya, dipatuhi apa perintahnya. Cinta tanah air dan kesediaan berkurban untuk mengibarkan

tinggi-tinggi panji-panji *kedaulatan bangsa* adalah modal dasar yang ampuh bagi Sultan Ali Mukhayat Syah menundukkan Pidie dengan mudah. Begitu pula dengan Pasei yang dipertahankan oleh garnizun Portugis tempat berlindung Sultan Ahmadsyah yang melarikan diri dari Pidie dapat ditundukkan oleh Sultan Ali Mukhayat Syah. Angkatan laut Portugis yang berpengalaman di bawah pimpinan Jorge de Brito dan garnizun Portugis di Pasei di bawah pimpinan Antonio de Miranda ternyata tak mampu menahan serangan besar dari rakyat yang cinta kemerdekaan di bawah pimpinan Laksamana Ibrahim dari Aceh Darussalam.

Seterusnya mari kita lihat mengapa Sultan Ali Mukhayat Syah menjadi raja yang besar dibanding dengan beberapa orang sultan sebelum dan sesudahnya. Bukankah Sultan Ali Mukhayat Syah berani mengambil tanggung-jawab membela kedaulatan bangsa. Bukankah dengan penuh kesadaran beliau mewariskan semangat kebangsaan itu kepada pengganti-penggantinya sehingga hal itu menjadi ukuran bagi pemerintahan yang baik atau tidak baik. Tidak heran kita bila Sultan Salahuddin (1528-1537) tidak populer di kalangan rakyat dan diturunkan dari tahta pada tahun 1537. Beliau tidak memperdulikan tugas sebagai pengemban tugas memerangi Portugis atau mempersiapkan konsolidasi kekuatan menghadapi Portugis. Sebaliknya penggantinya yang dinaikkan di tahta pada tahun 1537, Sultan Alauddin Riayat Syah (1537-1568), Sultan Ali Riat Syah (1568-1575) diagungkan oleh rakyatnya sebab berani menyerang Portugis di Malaka. Selain dari itu perlu pula diingat jasa-jasa mereka menghimpun kekuatan sepanjang pesisir timur Sumatera dengan menyerang serta menyatukan Aru di Sumatera Timur, untuk sama-sama menghadang Portugis.

Ringkasnya, bahwa pada saat itu semua sultan yang dianggap tidak mampu mengatasi segala kemelut menghadapi Portugis, semua sultan yang tidak mempunyai kesungguhan mengkonsolidasikan kekuatan pasti diturunkan atau dibunuh. Tercatat beberapa sultan yang mengalami nasib demikian, yaitu antaranya Sultan Sri Alam yang hanya memerintah beberapa bulan saja, Sultan Zainuddin yang hanya memerintah tak sampai setahun, Sultan Ali Riayat Syah (1586-1588)—mati terbunuh—hanya dua tahun memerintah, Sultan Ali Mukhayat Syah (1588-1606) yang

diturunkan dari tahta, Sultan Ali Riayat Syah (Sultan Muda, 1604-1607) yang juga diturunkan dari tahta.

Tidak demikian halnya dengan Sultan Iskandar Muda, Sultan terbesar dari semua yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam. Berbagai julukan yang diberikan, seperti Dharmawangsa, Perkasa Alam, Johan Berdaulat, atau gelar Perkasa Alam Maharaja Dharmawangsa Tun Pangkat menggambarkan kebesaran beliau. Malahan setelah mangkat keharumannya memberikan nama yang agung dengan sebutan "Marhum Mahkota Alam".

Kebesaran Sultan Iskandar Muda ialah terletak dalam strategi yang kuat mencapai tujuan membela kedaulatan bangsa. Beliau tidak menggantungkan nasib pada bantuan Turki yang demikian jauh tempatnya dari Aceh, melainkan melakukan konsolidasi kekuatan militer dan ketahanan ekonomi. Diplomasinya yang tinggi berhasil mengkait keuntungan dari pertikaian sesama kaum kolonial dari persaingan Portugis, Inggris, dan Belanda. Untuk mengontrol perdagangan lada di sepanjang pantai semua pelabuhan itu dikuasai. Begitulah di pesisir barat Natal, Tiku, Pariaman, Salido, dan Indrapura dikuasai. Di pantai Timur begitu pula, seperti di Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhok Seumawe, Kuala Pase, Jambo-ae, dan akhirnya diperbaharuilah penanaman kekuasaan di Sumatera Timur. Di Deli berkuasa keturunan Gicah Pahlawan, di Asahan Sultan Abdul Jalil adalah turunan Sultan .

Setiap aksi tentu mendatangkan reaksi. Bergantung kepada rekasi itu pula ditetapkan mana kebijaksanaan yang didahulukan. Begitulah ketika Johor melakukan perjanjian-perjanjian dengan Portugis (1610) dan sebelum itu dengan Belanda (1607). Sultan Iskandar Muda memaklumi bahwa hal itu akan berbahaya besar di belakang hari. Itulah sebabnya usaha yang besar harus dipersiapkan untuk menyatukan Johor ke dalam lingkungan kuasa Aceh. Serangan itu berhasil menundukkan Raja Bungsu di Singgasana Johor yang berisiterikan puteri Aceh.

Uraian ini dimaksudkan untuk melihat isi kedaulatan Aceh itu secara materiel. Agar jelas bagi kita hendaknya bahwa kedaulatan Aceh dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya adalah berisi dua hal; *pertama* berisikan kesetiaan rakyat anti

kolonialisme dan berusaha melakukan persatuan seluas mungkin untuk membendung kekuatan kolonial itu. Secara materiel kedaulatan Aceh meliputi daerah Aceh seluruhnya ditambah dengan daerah Sumatera Timur bekas Kerajaan Aru dan Panai yang luas di selatan berbatasan dengan Riau. Begitu pula daerah pesisir barat berbatas dengan Bengkulu, sedang di Semenanjung Malaka kedaulatan Aceh diakui oleh Johor, Pahang, Perak, Kedah, Trengganu, Kelantan, dan Patani. Kedaulatan yang demikian itu didukung oleh kekuatan militer yang kuat di darat dan di laut didukung pula oleh kekuatan ekonomi yang kuat dengan menguasai perdagangan di seluruh wilayah yang dikuasai Aceh, ditambah dengan perdagangan internasional dari seluruh barang-barang perdagangan di Indonesia yang berpusat di Aceh.

oooOooo

BATAS PENGERTIAN PERANG ACEH DALAM SISTEMATIKA SEJARAH NASIONAL

Sebutan "Perang Aceh" berasal dari istilah bahasa Belanda *"De Aceh Oorlog"* yang dipergunakan penulis-penulis kolonial dalam membicarakan perang yang terjadi antara Aceh dengan Belanda sejak tahun 1873.[5]

Pengertian itu berisi batasan tentang Perang Aceh yang berbeda dengan perang-perang yang terjadi di daerah lain di Indonesia, seperti Perang Bali, Perang Banjar, Perang Makassar, Perang Minangkabau, Perang Banten, Perang Jawa, dan lain sebagainya. Penulisan seperti ini bersifat daerah sentris, yang menjadikan masyarakat daerah suku bangsa di Indonesia sebagai subyek sejarah yang terpisah dengan yang lainnya.[6] Dengan tidak disadari istilah itu menjadi umum terpakai dalam penulisan sejarah di negeri kita, baik buku pelajaran maupun karya ilmiah lainnya.[7]

Pengakuan kita bahwa Perang Aceh sebagai perang yang berdiri sendiri terlepas dari perang-perang yang lain yang dilakukan Belanda di Indonesia sejak abad ke-16 adalah pokok pangkal kesalahan kita dalam Ilmu Sejarah. "Beberapa rumpun hilalang itu sesungguhnya berasal dari batang yang sama di bawah tanah."

---

5. Lihat, misalnya E.S. de Klerk, *De Atjeh Oorlog 1912*, kemudian istilah yang dipergunakan dalam karangan stempel, *Geschiedenis van Nederlands Indie*, begitu pula dalam karangan Colenbrandes, *Koloniale Geschiendenis*, 1925.
6. Tentang Sejarah Nasional dan sejarah daerah bacalah karangan Drs. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Bhratara, Jakarta, 1961.
7. Perhatikan misalnya dalam buku karangan Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan 1981, juga karangan H.M. Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, Iskandar Muda, Medan, 1961. Seterusnya perhatikan prasaran-prasaran pada Seminar Sejarah Perjuangan Aceh, Medan, 1976.

Sesungguhnya Perang Aceh itupun demikian pula yang terlihat sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri, sebenarnya adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan perang-perang lain yang berlangsung di daerah-daerah lain di Indonesia. Akarnya satu, yaitu usaha kolonialisme Belanda menanamkan kekuasaannya di Indonesia dengan meruntuhkan kedaulatan bangsa Indonesia. Begitu pula perlawanan rakyat Aceh adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari perlawanan seluruh rakyat Indonesia mempertahankan kedaulatannya dari ancaman kolonialisme Belanda.

Sebutan lain tentang Perang Aceh adalah ("Perang Kumpeni" atau "Aceh lawan Kumpeni".[8] Pengertian itu mendekati pengertian yang sesungguhnya pada isi. Namun harus diingat, sebagai dikatakan tadi bahwa peperangan yang seperti itu bukan hanya terjadi di Aceh melainkan juga di berbagai tempat lain di Nusantara. Malahan dalam tinjauan yang lebih luas peperangan yang demikian itu juga terjadi diberbagai negeri di Asia dan Afrika. Perkataan "Kumpeni" berasal dari masa VOC yang telah berakhir hidupnya pada tahun 1800. Namun sifat-sifat hakiki Kumpeni, yaitu mencari keuntungan perdagangan melalui penguasaan daerah dengan kekuatan militer tetap menjadi watak kolonialisme Belanda di Indonesia dengan masa sesudah tahun 1800 hanya terletak pada pengorganisasian dan metode eksploitasi saja.

Banyak alasan yang dikemukakan para ahli sejarah tentang sebab musabab terjadinya kecenderungan memiliki tanah jajahan. Di antara alasan-alasan yang dipakai oleh Frederick Schuman dicatat antara lain: *"... over population, the need for the market, the white man's burden, capital investment, trade follows the flag, exploitation of subject peoples, and monopolistic stage of capitalism ..."*[9]

Namun setelah mempelajari watak kolonialisme itu Dr. Ruslan Abdulgani sampai kepada kesimpulan, bahwa kolonialisme itu memiliki aspek-aspek politik, sosial, dan budaya. Apabila dicari aspek pokoknya, maka keempat aspek itu jadi saling berhubu-

---

8. Orang Aceh sendiri mempergunakan istilah ini; sebuah hikayat berjudul *Hikayat Prang Kompeni*, karangan Do Karim, seorang perwira tentara Aceh.
9. Frederick L. Schuman, *International Politics*, McGraw-Hill Book Co., N.Y., hal. 306.

ngan dengan susunan: *"eksploitasi ekonomi melalui dominasi politik dan penetrasi sosial budaya"*.[10] Dengan uraian ini jelaslah kiranya, bahwa sebab pokok Perang Aceh itu—demikian pula perang-perang kolonial yang dilakukan Belanda di Indonesia, malahan yang dilakukan oleh kaum kolonial di mana saja di permukaan bumi ini—tak lain dari usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan kekuatan militer, agar dapat diperoleh situasi dan kondisi yang paling baik bagi mereka.

Dengan demikian jelaslah pula bagi kita, alasan yang dipergunakan Nieuwen Huyzen, Komisaris Tinggi Hindia Belanda, dalam surat-surat ancamannya kepada Sultan Aceh beberapa hari menjelang pengumuman perang, yang menuduh Aceh tidak menunjukkan sikap bersahabat dengan Belanda, yang menuduhkan bahwa Aceh bersiap-siap mencari bantuan Amerika dan Itali untuk memperoleh kekuatan melawan Belanda, bahwa Hindia Belanda "merasa mendapat panggilan nasib" untuk memelihara ketertiban umum di wilayah ini, semua itu adalah bohong besar, menutupi niat buruk, mengandung fitnah yang dirasakan terlalu berat bagi orang Aceh. Pantaslah kiranya orang Aceh menyebut pula, bahwa Perang Aceh itu sebagai perang melawan kafir laknat Allah. Bahkan pada bangsa Portugis yang ciri-ciri keagamaan masih terlihat dalam gerak kolonialisme mereka, sebenarnya mereka lebih tertarik pada *"Gold and Glory"* daripada *Gospel*. Seorang Kristen pun mengakui bahwa: "Orang-orang Portugis telah memasuki India (juga Indonesia dan tempat-tempat lain di Asia, *pen*) dengan pedang di tangan kanan dan salib di tangan kiri. Akan tetapi ketika mereka menemui terlalu banyak emas, maka salib itu pun dilepaskannya supaya tangan mereka dapat mengisi saku-saku mereka".[11]

Nanti akan kita bicarakan segi ekonomi dari kehidupan masyarakat Aceh yang menjadi motivasi obyektif bagi perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Segi ini kurang mendapat tempat dalam pembahasan-pembahasan sejarah selama ini. Kita selalu melihat segi agama yang memang tidak dapat dimungkiri sebagai motivasi yang sangat kuat dalam perang ini bagi orang Aceh. Satu

---

10. Dr. Ruslan Abdulgani, *Sosialisme Indonesia*, Prapanca, Jakarta, 1964, hal. 74.
11. Dr. Th. Muller Kruger, *Sejarah Gereja di Indonesia*, BPK, Jakarta, 1959, hal. 19.

hal harus kita ingat, bahwa *Agama Islam yang dianut orang Aceh tidak hanya mengajarkan agar orang syahid mencari sorga, melainkan di samping itu ajaran Islam menyuruh orang mencari kebahagiaan di dunia. Syahid dalam pengertian Perang Aceh bukan sekedar maju ke medan perang dan gugur, melainkan syahid dalam arti mempertahankan haq dan kemuliaan bangsa.*

Ditinjau dari kekuatan yang dihadapi Aceh dalam perang itu, maka tidak dapat dilupakan, bahwa di samping Belanda yang terang menyatakan perang, sebenarnya Inggirs bekerjasama menciptakan perang itu. Kerjasama Inggris dan Belanda di Asia dan tanah jajahannya yang lain sangat kuat sejak selesainya perang-perang koalisi di Eropa. Untuk membendung kekuatan Prancis, yang sangat berbahaya bagi Inggris, maka Inggris memerlukan teman yang kuat di daratan Eropa. Sebaiknya teman itu bertempat tinggal di wilayah yang membatasi negeri Prancis dan Inggris, itulah Negeri Belanda. Belanda ingin dijadikan Inggris sebagai negeri penyangga bagi ancaman Prancis di Eropa. Perubahan politik kolonial Inggris di Indonesia sejak Convention of London 1814, menjadi Treaty of London 1824, kemudian Treaty of Sumatra 1872 tak lain dari usaha sekongkol yang mendorong Belanda untuk memerangi Aceh. Sekarang jelaslah kiranya bahwa Aceh dalam perang itu tidak hanya berhadapan dengan Belanda saja, melainkan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan internasional yang tidak ada tolok bandingnya.

Sekarang marilah kita lihat pula Perang Aceh itu sesuai dengan topik yang kita bahas, yaitu dalam kaitan "kedaulatan" yang diembannya. Tinjauan kita sampai saat ini masih kita batasi dari segi hukum nasional. Tinjauan itu akan berbeda dengan tinjauan perasaan hukum atau semangat hukum yang nanti akan dibahas pula.

Dari segi hukum kedaulatan bangsa Indonesia, pada abad ke-16 terdapat beberapa negara nasional yang berkedaulatan di Nusantara. Di antaranya ialah Aceh, Banten, Demak, Ternate, dan Tidore. Kemudian pada abad ke-17 muncul pula Makassar sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana dikatakan pada pendahuluan, pengertian kita tentang negara berdaulat itu kita batasi dengan dua hal, yaitu mempunyai wewenang tertinggi melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan menetapkan kebijak-

sanaan hubungan luar negeri. Satu per satu kerajaan-kerajaan itu kehilangan kedaulatannya pada abad ke-16 dan ke-17, pada masa Portugis dan VOC. Kewenangan mereka mengatur hubungan luar negeri, terutama dalam perdagangan dan pertahanan telah jatuh ke tangan kaum kolonial. Setelah melalui peperangan-peperangan, maka Makassar mengakui kewenangan VOC (1666), Banten begitu pula (1682), Demak yang tadinya kuat telah runtuh dan pusat pemerintahan di Jawa pindah ke Mataram, setelah Sultan Agung mangkat, sedikit demi sedikit kekuasaan Belanda telah masuk ke Mataram. Akhirnya dalam Perjanjian Gianti 1755, Mataram yang besar itu telah dirobek-robek menjadi negeri kecil yang mengakui kedaulatan Belanda.

Pada abad ke-18 sebahagian besar kerajaan-kerajaan di Indonesia telah kehilangan kewenangan dalam hubungan luar negeri. Kemudian pada abad ke-19, setelah pemerintah Belanda mengambil oper pemerintahan dari VOC, Belanda semakin mengintensifkan kekuasaan mengatur pemerintahan dalam negeri terutama di Jawa. Di berbagai kerajaan di luar Jawa kekuasaan Belanda juga diperkuat dengan memerangi kembali raja-raja yang dianggap Belanda kurang mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak dengan Belanda. Kontrak-kontrak yang dimaksud adalah dalam perdagangan. Demikianlah raja-raja besar di Indonesia bukan saja tidak mampu lagi mengatur kebijaksanaan hubungan luar negeri, malahan juga tidak mampu memberi perlindungan kepada rakyatnya.

Dipandang dari segi kedaulatan bangsa Indonesia, maka tahun 1873 Acehlah satu-satunya "negara nasional" yang berdaulat. Panji-panji kemerdekaan bangsa Indonesia masih berkibar di negeri-negeri ini, sedangkan di daerah-daerah lain panji-panji itu telah kuncup dan tidak dapat dijadikan tempat berlindung lagi. Dengan demikian dari segi kehormatan bangsa Indonesia pada waktu itu Acehlah satu-satunya negeri tempat menggantungkan harapan membela kehormatan bangsa.

Akhirnya segi ini, seusai dengan metode tinjauan kita, maka pengertian Perang Aceh bukan hanya seperti yang biasa dipahamkan orang, melainkan adalah satu peperangan yang sangat besar artinya bagi bangsa Indonesia, yaitu peperangan yang memper-

taruhkan kehormatan seluruh bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka.

Krisis Kepemimpinan, Desintegrasi dan Restorasi Kedaulatan Aceh

Sejarah Aceh sejak mangkatnya Sultan Iskandar Muda (1636) menunjukkan "krisis kepemimpinan". Yang dimaksud dengan krisis kepemimpinan itu adalah: Selama lebih kurang 200 tahun tidak ada raja yang berkuasa besar duduk di Singgasana Kerajaan Aceh. Enampuluh tahun di antaranya diisi ratu-ratu (kepala negara wanita), selebihnya oleh raja-raja yang sangat lemah. Ada raja yang hanya berkuasa beberapa bulan saja, adapula kalanya sukar mendudukkan seorang raja di atas tahta yang mengakibatkan kosongnya singgasana untuk beberapa lama.[12]

Lemahnya pusat pemerintahan diikuti oleh proses desintegrasi kedaulatan Aceh. Mulai dengan pemisahan diri beberapa wilayah yang jauh seperti Johor di Semenanjung Melayu, Minangkabau dan Sumatera Timur. Isi perjanjian antara Aceh dengan Gubernur Jenderal Maetsuyker (1659) memberikan sedikit sekali kekuasaan yang tersisa bagi Aceh, sebab hak menguasai seperti hasil timah di Perak yang ada di tangan Aceh menurut perjanjian itu tidak akan dapat dimanfaatkan oleh Aceh yang sudah sangat lemah.[13]

Traktat Painan (6 Juli 1663) yang ditanda-tangani penguasa-penguasa pesisir di Sumatera Barat dengan VOC menyebabkan hilangnya pengaruh Aceh di Indrapura, Tiku, Padang, dan beberapa tempat lain di wilayah itu. Kejadian yang paling menentukan bagi perubahan sejarah Aceh adalah hilangnya pengaruh Aceh di Sumatera Timur pada tahun 1862, sebab Belanda berhasil menekan pemerintah setempat yaitu Panai, Bilah, Serdang, Deli, Langkat, yang menanda-tangani *"Acte van Erkening en Bevestiging"* dengan pemerintah Belanda. Perlawanan Sultan Ahmad Syah dari Asahan sia-sia karena tidak dapat mengharapkan bantuan dari Aceh.

---

12. Untuk melihat daftar raja-raja yang memerintah di masa yang disebutkan itu periksalah *Tarikh Aceh dan Nusantara*, karangan H.M. Zainuddin, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961, hal. 405-429.
13. D.G. Hall, *A History of Southeast Asia*, McMillan and Co. Ltd., N.Y., 1960, hal. 288.

Restorasi kedaulatan Aceh berlangsung pada pemerintahan Sultan Alaiddin Juhar Alam Syah (1802-1870). Kekuasaan di pesisir barat dan timur dapat dipulihkan dan hubungan bilateral dengan pemerintah Hindia Belanda dapat diatur melalui perjanjian 1857. Ditinjau dari kedaulatan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Mansyur Syah adalah masa restorasi kedaulatan Aceh setelah lebih kurang 200 tahun mengalami kemunduran.

oooOooo

KRISTALISASI KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT ACEH ADALAH PROSES DEMOKRATISASI MENURUT AJARAN ISLAM

Di atas telah kita bicarakan betapa lemahnya kekuasaan pemerintah pusat setelah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Begitu pula akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi daerah-daerah kekuasaan Aceh yang melepaskan diri dan masuknya pengaruh kekuasaan Belanda. Pengaruh kekuasaan Belanda itu berbatas pada daerah yang jauh di luar Aceh seperti Semenanjung Melayu, Sumatera Barat, dan Sumatera Timur. Di Aceh sendiri walaupun kekuasaan Sultan sangat lemah, tidak berarti kedaulatan Aceh sebagai negara yang merdeka hilang sama sekali. Hubungan dengan negara lain tetap berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan tata hubungan negara merdeka dan berdaulat. Kepala-kepala pemerintahan bangsa-bangsa yang berdatangan ke Aceh, sesungguhnya masa itu adalah masa Aceh berada pada puncak kemajuan hubungan perdagangan.

John Anderson yang hidup pada masa itu menggambarkan kemajuan perdagangan Aceh pada abad ke-19 dari tiga segi, yaitu jumlah pelabuhan yang melakukan perdagangan, bangsa-bangsa asing yang datang berdagang dan volume ekspor dan impor Aceh.[14] Nama-nama pelabuhan antaranya masih dapat kita tandai sekarang ini, yaitu: *Tapoos, Pulodua, Kalavat, Telapow, Mucki, Labuhan Haji, Manghin, Scimeyon, Taddow, Senangkan, Analaboo, Pulo Ryah, Singkel, Ayam Dammah, Terooman, Rambong, Saluhat, Soosoo, Kevala Batu, Bahross, Tampat Tuan, Sama Dua, Peudada,*

---

14. John Anderson, *Acheen*, Oxford Univeristy Press, 1971, terutama hal. 159, 160, 161, 222-224, dan seterusnya.

Lawang, Pedir, Pakan, Selu, Burong, Mudoo, Samalanga, Passangan, Jungka, Teluk Semoy, Cunda, Passay, Cuttoy. Walaupun ejaan yang dipergunakan Anderson itu tidak tepat benar, namun jelaslah bagi kita betapa banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang membuka hubungan internasional dengan segala bangsa seperti Inggris, Amerika, Itali, Prancis, dan lain-lain.

Betapa lemahnya kekuasaan pemerintah pusat pada masa yang panjang itu dapat ditandai dengan sulitnya kadang-kadang ditetapkan seorang Sultan yang harus didudukkan di atas tahta sehingga ada masa lowong di mana tidak Sultan yang menduduki tahta. Pada masa yang demikian itu tidak heran kita pemerintahan Aceh tidak dapat dikoordinasikan dengan baik. Wilayah-wilayah yang jauh dengan pusat pemerintahan di luar wilayah Aceh yang sekarang ini melepaskan diri sedang di wilayah Aceh sendiri para penguasa daerah berdiri sendiri.

Di balik itu semua ada pula segi positif yang diperoleh dalam perjalanan sejarah yang nanti berakibat besar bagi pertahanan Aceh selama Perang Aceh. Pertama, *dari segi penampilan putri-putri Aceh sebagai Kepala Pemerintahan yang berlangsung cukup lama memberi arti penting bagi kedudukan kaum wanita di daerah ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Nusantara. Lahirnya pahlawan-pahlawan putri Aceh selama Perang Aceh seperti Cut Nya' Dhien, Cut Meutia, Teungku Fakinah, dan lain-lain yang jumlahnya sebenarnya jauh lebih banyak, tak boleh tidak adalah merupakan hasil sejarah yang gemilang digodok oleh pengalaman putri Aceh memimpin pemerintahan selama beberapa puluh tahun di pusat pemerintahan.* Hal kedua yang tidak kalah pentingnya ialah *kristalisasi kepemimpinan di wilayah Aceh di kalangan ulama dan bangsawan yang besar pengaruhnya*, yang kuasanya tertanam jauh di hati rakyat merupakan kekuatan yang besar yang semula tidak diperhitungkan oleh Belanda pada permulaan Perang Aceh. Belanda mengira seperti daerah-daerah lain di Indonesia, jika Sultan telah dapat ditawan, maka dengan sendirinya peperangan akan padam. Ketergantungan pimpinan masyarakat kepada Raja tidak dijumpai dalam masyarakat Aceh, setiap *sagi* telah memimpin diri sendiri, di bawahnya malahan setiap *gampong* juga telah terkristal kepemimpinan antara ulama dan kepala desa. *Akhirnya ajaran agama Islam yang terhunjam dalam*

kehidupan masyarakat Aceh meyakinkan pada diri sendiri untuk berperan melakukan tugas membela negara dan agama di jalan Allah SWT. Pergeseran kepemimpinan dalam masyarakat Aceh dari tangan "Sultan" yang berdaulat ke tangan kepala-kepala pemerintahan di daerah dan kepala-kepala pemerintahan di pedesaan yang didukung oleh pemimpin-pemimpin agama adalah proses perubahan penting yang dapat disebut sebagai perubahan "kedaulatan raja" kepada bentuk "kedaulatan rakyat" di daerah ini. *Sesungguhnya pertumbuhan alam pikiran kedaulatan rakyat yang didasarkan pada persamaan derajat manusia menurut ajaran Islam telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di Aceh sebelum pengaruh Barat masuk ke daerah ini. Ajaran agama Islam yang menggariskan bahwa tinggi rendahnya derajat manusia ditentukan oleh ketaqwaannya kepada Allah dan amal saleh dapat mengangkat derajat lapisan bawah ke lapisan yang tertinggi.*

Dalam hal ini peranan para ulama dan para penata agama sangat penting artinya yang memimpin mesjid serta *meunasah* yang telah melembaga di seluruh pelosok sampai ke pedalaman. Beberapa faktor yang mendukung terjadinya proses demokratisasi itu ialah majunya pendidikan dan perkembangan perekonomian pedesaaan. Majunya pendidikan Islam di daerah ini menyebabkan hampir semua orang di pedesaan dapat menulis dan membaca, dapat menuntut berbagai ilmu pengetahuan, dapat memahami berbagai pikiran falsafah yang tinggi. Pengaruh pendidikan yang demikian itu demikian mendalamnya sehingga adat istiadat tradisional seluruhnya telah disesuaikan dengan ajaran Islam dan kultur Islam itu sendirilah yang menjadi adat istiadat bagi masyarakat Aceh.[15]

Kemajuan perekonomian pedesaan hanya dapat kita pahami jika kita lihat majunya pelabuhan-pelabuhan yang mengekspor dan mengimpor berbagai barang perdagangan "internasional". Para petani di pedesaan tidak hanya mengusahakan bahan makanan, melainkan juga terlibat dalam penanaman dan pengusahaan kultur ekspor seperti lada, pinang, dan berbagai jenis tanaman lain. Catatan-catatan perdagangan di Penang pada abad ke-19

15. Mengenai pendidikan dan kebudayaan, baca prasaran Drs. Ismuha, SH, dan juga prasaran Drs. Thamrin Z. pada Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh, 1978.

dari Aceh mendaftarkan tidak kurang dari duapuluh jenis hasil bumi dan hasil hutan yang diekspor dari berbagai pelabuhan di Aceh. Begitu pula barang-barang yang dimasukkan hampir sama jumlah jenisnya. Pengkajian tentang mata-uang, timbangan dan ukuran yang telah dibahas dalam Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh (1978) yang lalu membuktikan bahwa pemakaian uang atau peredaran uang demikian luasnya sampai ke pedesaan. Hal itu memberi keterangan kepada kita bahwa "ekonomi uang" tidaklah sesuatu yang baru dalam masyarakat Aceh. Tegasnya masyarakat Aceh bukanlah masyarakat petani maju yang telah banyak melepaskan diri dari tradisi secara dinamis. Pandangan van Leur yang menganggap dalam masyarakat Indonesia kuno tidak terdapat golongan pedagang, dan semua perdagangan adalah kegiatan Raja tidak berlaku dalam masyarakat Aceh. Sekurangnya bagi masyarakat Aceh pada abad ke-17 dan seterusnya. Kalau di Jawa uang diperkenalkan dengan lumbung-lumbung desa oleh pemerintah kolonial sejak akhir abad ke-16 dalam rangka melepaskan masyarakat desa dari ikatan feodal, di Aceh uang dipasarkan melalui perdagangan yang maju sejak abad ke-16. Dari uraian di atas kita ingin memperlihatkan bahwa kristalisasi kepemimpinan dalam masyarakat Aceh selama 200 tahun berjalan secara sehat dengan ciri pokok terangkatnya golongan masyarakat paling bawah atau rakyat biasa menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh untuk kelompok-kelompok yang kecil di bawah kepemimpinan penguasa-penguasa daerah dan para alim-ulama. Untuk beberapa lama proses itu kelihatannya seperti krisis, karena berakibat sangat berkurangnya kekuasaan Sultan. Namun *menjelang Perang Aceh kristalisasi itu sempurna sudah dengan menyatunya rakyat, ulama, golongan bangsawan dengan pimpinan raja sebagai kepala negara. Perang Aceh adalah perang rakyat semesta yang sungguh-sungguh sehingga setiap tapak tanah di negeri ini harus direbut Belanda dengan korban-korban yang besar.*

Pengumuman Perang Sabil di Mesjid Indrapuri (2 Februari 1885), oleh Tgk. Syekh Saman dengan persetujuan *uleebalang* dan ulama-ulama, mengandung arti bahwa seluruh rakyat Aceh bersama-sama dengan Sultan sama bertanggung-jawab di hadapan Tuhan mempertahankan kedaulatan Aceh. Siapakah yang

paling taqwa di hadapan Tuhan itulah yang paling berhak memegang pimpinan, paling mulia dan di tangannyalah terpegang kedaulatan Aceh sebagai khalifah di bumi menurut hukum Allah.

Restorasi kedaulatan Aceh sejak tahun 1885 adalah formal di tangan raja, material di tangan seluruh rakyat di bawah pimpinan yang mereka angkat sendiri menurut permusyawaratan dalam Islam, *"Wa amruhum syura bainahum"*, maka segala hal ikhwal yang berhubungan dengan pemerintahan, juga yang menyangkut kepada pimpinan- pimpinan mereka musyawarahkan, mereka ber-*bai'at*, mereka meneruskan perjuangan di jalan Allah. Semua yang gugur di medan perang, syahid hukumnya, surga bahagiannya, mereka yang ditawan didoakan keselamatannya, sedangkan mereka yang oleh berbagai hal "uzur" dan hilang kekuatannya diserahkan urusannya kepada Allah Yang Maha Mengetahui.

oooOooo

ACEH TIDAK PERNAH MENYERAHKAN KEDAULATANNYA KEPADA BELANDA

Dalam bahagian-bahagian yang lalu telah kita bahas "pengertian Aceh" dari berbagai segi. Dari segi politik Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan nasional di Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan bangsa Indonesia. Dari segi pandangan politik luar negerinya adalah anti kolonialisme, cinta perdamaian dan mengembangkan hubungan persahabatan dengan negara lain di dunia. Dari segi kekuatan sosial politik yang mendukungnya, Aceh bukan kerajaan yang dikuasai oleh raja absolut melainkan negeri yang didukung oleh federasi sekian banyak kekuasaan besar dan kecil yang menempatkan sultan sebagai Kepala Negara. Rakyat Aceh adalah pribadi-pribadi muslim yang taat yang menjunjung tinggi pemerintahan seimbang dengan kebebasan pribadi dalam membela kebenaran dan keadilan.

Pada saat-saat pecahnya Perang Aceh seluruh kekuatan itu telah siap dikonsolidasikan oleh Sultan Alaiddin Ibrahim Mansyur Syah menjadi kekuatan besar yang bangkit kembali menentang kekuasaan kolonial. Kekuasaan pemerintah pusat telah diciptakan dengan keseimbangan yang serasi dengan kekuasaan kepala-kepala daerah sampai tingkat pedesaan yang didukung oleh para bangsawan dan ulama sebagai inti aparatur pemerintahan.

Dalam situasi demikianlah Belanda datang ke Aceh dengan kekuatan bersenjata dan meyampaikan ultimatum, agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda. Ultimatum itu disampaikan kepada Sultan dan minta jawaban berbilang jam. Rupanya bagi pandangan Belanda pengertian Aceh adalah Sultan Aceh yang duduk di singgasana. Belanda benar-benar tidak faham tentang Aceh yang

dihadapinya pada tahun 1873. Menerima ultimatum yang demikian itu pikiran Sultan Aceh, Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1870-1874), tentu saja bukan terarah kepada kapal-kapal perang Belanda yang sedang mengancam. Beliau menyadari betul betapa kecilnya wewenang yang ada di tangan beliau untuk memutuskan hal yang sepenting itu. Di hadapan beliau terbayang kebulatan tekad seluruh rakyat yang siap membela kedaulatan Aceh. Kedaulatan itu sudah ada di tangan seluruh rakyat dari segala lapisan. Oleh sebab itu jawaban Sultan dalam surat beliau kepada Nieuwen Huyzen sungguh tepat sekali:

> "... sedikitpun tidak ada tumbuh keinginan untuk merubah hubungan persahabatan yang sudah ada"

Sultan pun maklum, jika beliau menanda-tangani penyerahan itu tentu beliau boleh terus memerintah negeri. Belanda tentu dengan segala senang hati membicarakan kontrak-kontrak perjanjian yang akan disetujui bersama. Malahan dalam beslit yang ada di tangan Komisaris Tinggi Nieuwen Huyzen ditegaskan, bahwa pemerintahan Hindia Belanda belum berniat membangun benteng di Aceh.[16]

Baik juga kita perhitungkan bentuk hubungan yang bagaimana kira-kira yang dikehendaki Belanda dengan Aceh, sekiranya Sultan mengisyaratkan kesediaannya memenuhi ultimatum Belanda itu. Pada waktu itu Negeri Belanda adalah sebuah kerajaan konstitusional, dan menurut konstitusi Negeri Belanda yang berlaku sejak tahun 1848, yaitu Konstitusi 1848 Pasal 59 dan 60, ditentukan bahwa Regeringsreglement, sistem moneter dan cara mengurus dan mempertanggung-jawabkan keuangan koloni harus ditetapkan dengan *wet*, sedang tiap-tiap hal intern lain dari koloni-koloni itu boleh diatur dengan *wet*. *"Opperbestuur"* atas koloni-koloni tetap dikendalikan oleh raja itu dibatasi, dan kekuasaan mengurus ditempatkan di bawah pengawasan *Staten General*. Berdasarkan konstitusi itu ditetapkanlah

16. Kutipan beslit itu dapat dibaca dalam buku Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan, 1981, hal. 721 dan seterusnya.

Regeringsreglement yang baru untuk Hindia Belanda yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1855. Di dalamnya diatur hubungan antara kekuasaan *Kroon* dalam hubungannya dengan *Staten General* dan juga hubungan antara Gubernur Jenderal dengan *Raan Van Indie.*[17]

Berdasarkan ketentuan itu pernah dibuat perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Aceh pada tahun 1857 yang berisi berbagai kerjasama perdagangan dan kerjasama keamanan yang kedudukannya sama dengan dua negara yang bersahabat. Perjanjian itu disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan kemudian juga mendapat pengesahan *Staten General.* Kenyataan kemudian, bahwa sesudah berjalan 16 tahun pemerintah Hindia Belanda atas persetujuan Menteri Jajahan yang waktu itu dipangku oleh Fransen van De Putte bermaksud mengadakan hubungan baru dengan Aceh dengan tujuan memperkukuh kedudukannya di Aceh dalam bentuk yang lebih baik bagi pemerintah Hindia Belanda. Menurut *Regeringsreglement 1855* itu telah diatur berbagai hubungan dengan negeri-negeri di Indonesia yang dapat dikategorikan atas tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, negeri yang langsung diperintahi langsung (*Direct Bestuurd Gebied, Gouvernementsgebied*) yaitu Batavia dan sekitarnya, serta beberapa kota besar di Indonesia.

Kedua, kerajaan-kerajaan Indonesia yang dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda berdasarkan kontrak-kontrak politik antara Gubernur Jenderal adalah mewakili Raja Belanda. Daerah seperti ini adalah daerah yang diperintahi secara tidak langsung (*Indirect Bestuur Gebied, Landschapsgebied*).

Ketiga, daerah-daerah yang dipengaruhi, yaitu kerajaan-kerajaan yang mengakui kedaulatan Raja Belanda dalam hubungan internasional berdasarkan perjanjian internasional atau perjanjian lainnya.

Dari ketiga bentuk itu Belanda sendiri mengakui bahwa tidak ada kejelasan bentuk hubungan antara Aceh dengan Hindia Belanda (maksudnya tidak termasuk ke dalam salah satu hubungan yang tersebut di atas), makanya Belanda minta kepada Sul-

17. G.J. Wolhff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun Mas, Jakarta, 1951, hal. 53.

tan agar Aceh mengakui kedaulatan Raja Belanda, sehingga jika itu dituruti maka kedudukan Aceh akan sama dengan "Kerajaan yang dipengaruhi", di mana *"Koningrijk der Nederlanden"* diakui *de jure* dalam pergaulan internasional antara Aceh dengan negeri-negeri lain.

Satu kenyataan sejarah, bahwa sesudah Perjanjian 1857 itu tidak ada lagi bentuk pembaharuan hubungan antara Aceh dengan Hindia Belanda. Berarti bahwa Aceh tidak mengakui adanya perubahan-perubahan yang diperbuat pemerintah Hindia Belanda di daerah kedaulatannya, termasuk perjanjian-perjanjian yang kelak dibuat Hindia Belanda dengan para *uleebalang* yang disebut "Plakat Pendek". Dari sini dapat dibuktikan bahwa Sultan tidak pernah melakukan perubahan perjanjian dengan Hindia Belanda, apalagi penyerahan kedaulatan atau penyerahan Aceh kepada Belanda tidak pernah ditanda-tangani oleh Sultan.[18]

Pernyataan yang menetapkan seluruh Belanda sebagai daerah yang langsung diperintahi Hindia Belanda tidak terbukti, sedang hubungan baru yang diperbuat Belanda dengan para *uleebalang* yang menanda-tangani "Plakat Pendek" tidak menjadi jaminan bahwa Aceh menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Baik di dalam wilayah *landschap* yang diperintahi *uleebalang* yang terikat dengan pemerintah Hindia Belanda, maupun di seluruh wilayah lainnya perlawanan terus berlangsung sampai akhir pemerintahan Hindia Belanda tahun 1942 di Indonesia.

oooOooo

18. Pelajari juga prasaran Prof. A. Hasjmy dalam Seminar Sejarah Perjuangan Aceh Sejak 1873 s/d Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di Medan, 1976, hal. 22-29. Prasaran itu berjudul "Peranan Agama Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan". Kenyataan sejarah yang penting artinya ialah, bahwa *Sultan yang berada dalam tawanan Belanda tetap mengadakan perlawanan dengan mencoba membuat hubungan dengan Kaisar Jepang. Walaupun hubungan itu tidak ada hasilnya secara fisik, tetapi politis hal itu berarti bahwa Sultan tidak mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh dan pembuangan Sultan ke Ambon tahun 1907, kemudian 1918 dipindahkan ke Betawi, adalah bukti sejarah yang paling berharga, bahwa Sultan tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda.*

PERJUANGAN BERSENJATA, PERGERAKAN KEMERDEKAAN, DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Bagaimana hebatnya perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat Aceh menghadapi agresi Belanda sejak tahun 1873 telah cukup dimaklumi. Tidak pernah Belanda menghadapi perang yang demikian berat sebelumnya di Nusantara. Korban-korban yang besar telah berjatuhan di kedua belah pihak. Korban di pihak Belanda membawa aib yang tak dapat dilupakan sejarah, sedangkan korban di pihak Aceh telah membawa keharuman nama bangsa Indonesia dan memberi isi kepada keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Pemerintah Hindia Belanda berusaha mengecilkan arti perjuangan rakyat Aceh dan menganggap, bahwa Perang Aceh telah selesai pada tahun 1903 dengan ditawannya Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah. Kenyataan sejarah menunjukkan kenyataan lain sama sekali dengan itu, sebab perjuangan rakyat ternyata berjalan terus sampai akhir masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia adalah ironi dalam sejarah Negeri Belanda, bahwa sementara mereka memerangi rakyat Aceh di Nusantara, tanah air mereka telah diduduki balatentara Jerman Nazi pada tahun 1939. Sungguhlah Allah itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil. Kita bersyukur kepadaNya, yang telah memperlihatkan kebesarannya dalam kenyataan sejarah. Kita bersyukur karena Tuhan telah menerima jeritan hati yang pedih para pejuang yang telah berjihad di jalanNya secara sungguh, dengan segala daya upaya yang ada.

Adapun perjuangan Aceh sesudah tahun 1903, yaitu setelah 20 tahun melakukan perjuangan bersenjata terus menerus, dapat kita bagi atas tiga kenyataan, yaitu:

Pertama, perjuangan bersenjata yang terus menerus dilakukan rakyat di bawah pimpinan ulama-ulama dan bangsawan, dalam bentuk perang frontal dan gerilya. Banyak hasil-hasil yang dicapai dalam perjuangan bersenjata itu, namun hasil yang paling besar ialah semakin merakyatnya kepemimpinan di tengah masyarakat, lebih-lebih pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, setiap pejuang adalah pemimpin, tidak perduli apakah ia ulama, bangsawan, atau rakyat biasa.

Kedua, perjuangan mempersiapkan generasi yang akan datang, generasi penerus melalui pendidikan. Untuk itu para pemimpin, baik ulama atau bangsawan, harus dengan jiwa besar meletakkan senjata membuka sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama Islam. Walaupun pemerintah Hindia Belanda berusaha dengan keras memisahkan anak-anak bangsawan yang diberi pendidikan Barat dengan masyarakat umum yang mendapat pendidikan di *meunasah* dan *dayah-dayah*, namun hasil perjuangan di bidang ini berhasil diisi dengan jiwa perjuangan bangsa secara fisik, perjuangan ini dilambangkan dengan tuntutan pemuda-pemuda di bawah pimpinan T. Nyak Arief yang berusaha mengambil oper pemerintahan dari tangan Belanda sebelum kedatangan balatentara Jepang ke Aceh. Hasil yang terbesar dari perjuangan ini ialah, bahwa setelah perjuangan rakyat Indonesia beralih dari perjuangan bersenjata kepada cara-cara organisasi moderen, melalui pergerakan kebangsaan, maka pemuda-pemuda terdidik di daerah ini telah siap.

Ketiga, perjuangan di bidang diplomasi. Untuk itu, Sultan dan Putera Mahkota, Tuanku Ibrahim, dengan jelas menunjukkan sikap kepada dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya harga diri. Beliau dengan tegas menolak bekerjasama dengan Belanda dan dengan teguh melancarkan perjuangan diplomasi dengan Kaisar Jepang. Pengalaman selama Perang Aceh pecah memberi keyakinan kepada beliau, bahwa tidak satu pun bangsa Barat dapat diajak bekerjasama dan tak satu pun mereka bersedia membantu. Kebijaksanaan monumental yang beliau rintis yang tak ternilai harganya ialah bahwa Aceh

pada saat yang genting itu tidaklah tertutup dari informasi dunia internasional. Rupanya beliau pun cukup mengetahui, bahwa negara-negara Islam pada waktu itu dalam kemelut yang sama dengan Aceh. Beliau adalah seorang yang realistis dalam berjuang, beliau mengetahui bahwa Jepang telah muncul sebagai negara besar yang diperhitungkan dunia internasional. Kesediaan beliau memilih hidup dalam pembuangan daripada bekerjasama dengan Belanda adalah modal mental rohani yang beliau tanamkan bagi perjuangan menjunjung tinggi kedaulatan bangsa Indonesia.

Akhirnya marilah kita lihat bagaimana hubungan semua perjuangan itu dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai muara dari semua perjuangan pergerakan yang mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Buah perjuangan bersenjata yang tak pernah berhenti dalam sejarah Aceh, baik selama kolonialisme Belanda maupun selama masa fasisme Jepang, membuahkan gerakan yang cerdas pada masa revolusi kemerdekaan. Belanda mengerti betul kesiapsiagaan pemuda-pemuda kita di Aceh dan tidak berani menginjakkan kakinya lagi di Aceh. Dengan demikian seluruh persenjataan baik yang tersisa dari zaman kolonial Belanda maupun senjata Jepang dapat direbut dan menjadi modal penting dalam penegakan Republik Indonesia. Pemimpin-pemimpin masyarakat yang telah ditempa dalam pergerakan seperti Syarikat Islam, Syarikat Aceh (Aceh Vereeniging), Partai Nasional Indonesia, Parindra, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), SPIA (Serikat Pemuda Islam Indonesia Aceh), Peramiindo (Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia), dan lain-lain telah siap dengan jiwa kebangsaan yang teguh yang selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap setia kepada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ajakan Belanda untuk membentuk Negara Sumatera tidak diperdulikan oleh pemimpin-pemimpin di daerah ini, dan Aceh tetap sebagai daerah modal dalam revolusi kemerdekaan Indonesia.

PENUTUP

Perang Aceh adalah peristiwa besar yang mempertaruhkan kedaulatan bangsa Indonesia dengan darah, doa, dan air-mata. Perang itu telah melahirkan pahlawan-pahlawan yang syahid dan gugur bagai kusuma bangsa. Banyak di antara mereka kita kenal namanya, namun lebih banyak namanya tak ternukilkan dalam lembaran-lembaran sejarah bangsa kita. Marilah kita menekurkan kepala sejenak memanjatkan doa ke hadhirat Allah SWT semoga Allah menempatkannya di tempat yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin.

oooOooo



Duduk di tengah: Sultan Muhammad Daud Syah (1884—1903); di sebelah kanannya berdiri Pang Hitam (perwira pengawal Sultan), dan di sebelah kirinya berdiri ajudannya, Teuku Ibrahim.

Setelah ditawan Belanda (1903), Sultan Muhammad Daud Syah menolak untuk menanda-tangani "Sarakata Penyerahan Kedaulatan Aceh" kepada Belanda, oleh sebab itu beliau dibuang ke Ambon dan kemudian ke Batavia.

(Sumber: A. Reid, *The Contest for North Sumatra*, h. 290; foto: Pierre Heijboer, *Klamboes, Kleuvangs, Klapperbomen*, h. 161.)



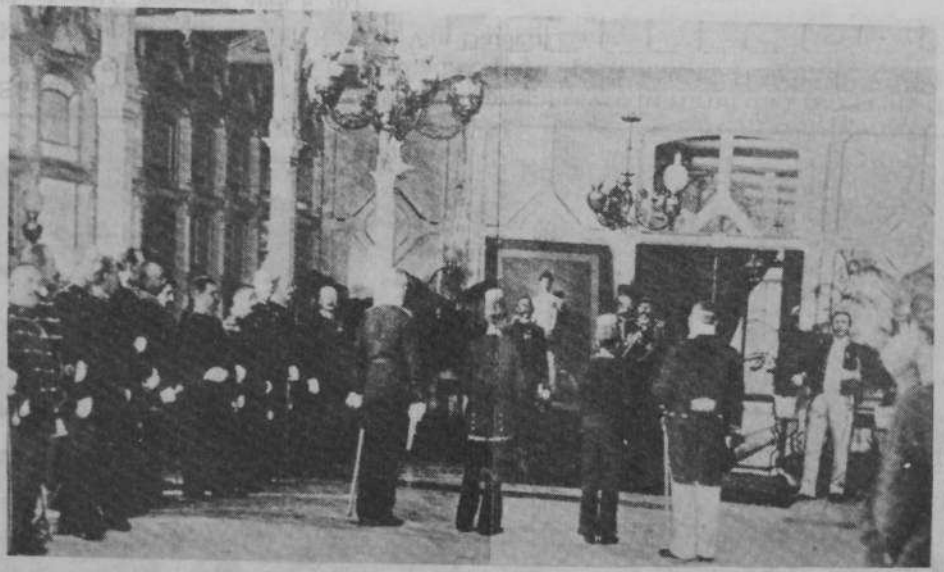
Duduk di tengah ialah Teungku Putroe, permaisuri Sultan Muhammad Daud Syah. Gambar ini dibuat tidak lama setelah beliau ditangkap oleh Pembantu Letnan H. Christoffel pada tanggal 26 November 1902.

(Sumber: H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, h. 70.)



Sultan Muhammad Daud Syah (berbaju putih) sewaktu turun dari kereta api di stasiun Sigli menuju ke tempat diadakannya "perdamaian" (1903); di sebelah kiri Sultan adalah Letnan Kolonel Van Daalen.

(Sumber: H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, h. 70.)



Sultan Muhammad Daud Syah bersama Putera Mahkota, Tuanku Ibrahim (membelakang) diapit dua perwira Belanda di Gubernuran Aceh. Peristiwa ini terjadi pada waktu Belanda mengadakan upacara penanda-tanganan "Sarakata Penyerahan Kedaulatan Aceh" kepada Belanda yang ditolak oleh Sultan.



Sultan Muhammad Daud Syah setelah ditawan oleh Belanda. Di sebelah kanan beliau duduk Mayor K. van der Maaten, perwira Belanda yang berhasil menawan beliau setelah Permaisuri dan Putera Mahkota di sandera.

(Sumber: H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, h. 21.)

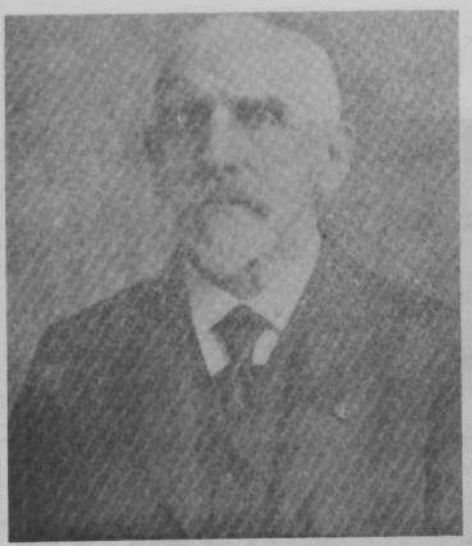


Sultan Muhammad Daud Syah, Teuku Panglima Polem, Tuanku Raja Keumala, dan para jenderal serta perwira menengah Belanda bergambar bersama, sekalipun Sultan Muhammad Daud Syah menolak untuk menanda-tangani "Sarakata Penyerahan Kedaulatan Aceh" kepada Belanda.

Duduk dari kiri ke kanan: Letnan Kolonel Van Daalen (nomor 3), Sultan Muhammad Daud Syah (nomor 5), Jenderal van Heutz (nomor 6), Teuku Panglima Polem (nomor 7), Tuanku Raja Keumala (nomor 8).

Berdiri dari kiri ke kanan: Tuanku Mahmud (nomor 3), Teuku Chik Meureudu (nomor 4), Teuku PanglimaMesjid (nomor 5), dan Teuku Nek Meuraksa (nomor 8).

(Sumber: H.J. Schmidt/M.H. du Croo, *Marechaussee in Atjeh*, h. 50a.)





Dr. C. Snouck Hurgronje, sarjana Belanda keturunan Yahudi (sebelah kiri). Ia amat berperan dalam upaya penaklukan Aceh yang tidak berhasil; menjadi penasehat Letnan Jenderal J.B. van Heutz (sebelah kanan), Gubernur Sipil dan Militer daerah Aceh. Salah karya tulis Dr. Hurgronje adalah *De Atjehers* (Orang-orang Aceh).

Jenderal van Heutz menderita luka parah dalam suatu pertempuran sengit di Batee Iliek yang terkenal. Keberhasilannya dalam menjalankan tugas-tugas di Aceh menyebabkan ia diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1904—1909).

(Sumber: (Dr. C. Snouck Hurgronje) H.J. Schmidt/M.H. du Croo, *Marechaussee in Atjeh*, h. 40a; (Jenderal van Heutz) A. Doup, *Gedenkboek van het Korps Marechaussee 1890—1940*, h. 75-79 dan 99-111.)



Letnan Jenderal G.C.E. van Daalen (menggantikan Jenderal van Heutz sebagai Gubernur Sipil dan Militer daerah Aceh, 1905—1908) yang amat ganas, pembunuh anak-anak dan perempuan yang tidak ikut perang; dia membakar kampung-kampung. Namun demikian, Aceh tidak pernah tunduk kepada Belanda.

(Sumber: H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, h. 165; dan Paul van't Veer, *De Atjeh-oorlog*, h. 267-272, 283-292.)



Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Muhammad Daud, salah seorang Pahlawan Perang di Jalan Allah Tanah Aceh, yang sangat ditakuti Belanda.

(Sumber: A. Doup, *Gedenkboek van het Korps Marechaussee 1890—1940*, h. 147-153; foto: H.C. Zentgraaff/W.A. van Goudoever, *Sumatraantjes*, h. 165.)



Teuku Imeum Muda, seorang **uleebalang** di Teunom, Aceh Barat, pernah memimpin dan menggerakkan pasukannya ke Aceh Besar. Kemudian, pasukannya bergabung dengan pasukan Aceh lainnya dalam pertempuran sengit melawan pasukan Belanda pada tahun 1874.

(Sumber: Paul van't Veer, *De Atjeh-oorlog*, h. 155; foto: A. Reid, *The Contest for North Sumatra*, 312.)



Letnan Kolonel purnawirawan W. Hoogers, veteran marsose. Sewaktu berpangkat Letnan, dia pernah memimpin sebuah patroli di daerah Tugkob, Aceh Barat, dan berhadapan dengan pasukan Pocut Baren, sehingga Pocut tertembak pahanya.

(Sumber: A. Doep, *Gedenkboek van het Korps Marechausssee 1890—1940*, h. 186.)



Pembantu Letnan W.J. Mosselman, bekas komandan brigade marsose yang melakukan penyerangan terhadap pasukan Cut Meutia. Srikandi itu gugur dalam pertempuran itu.

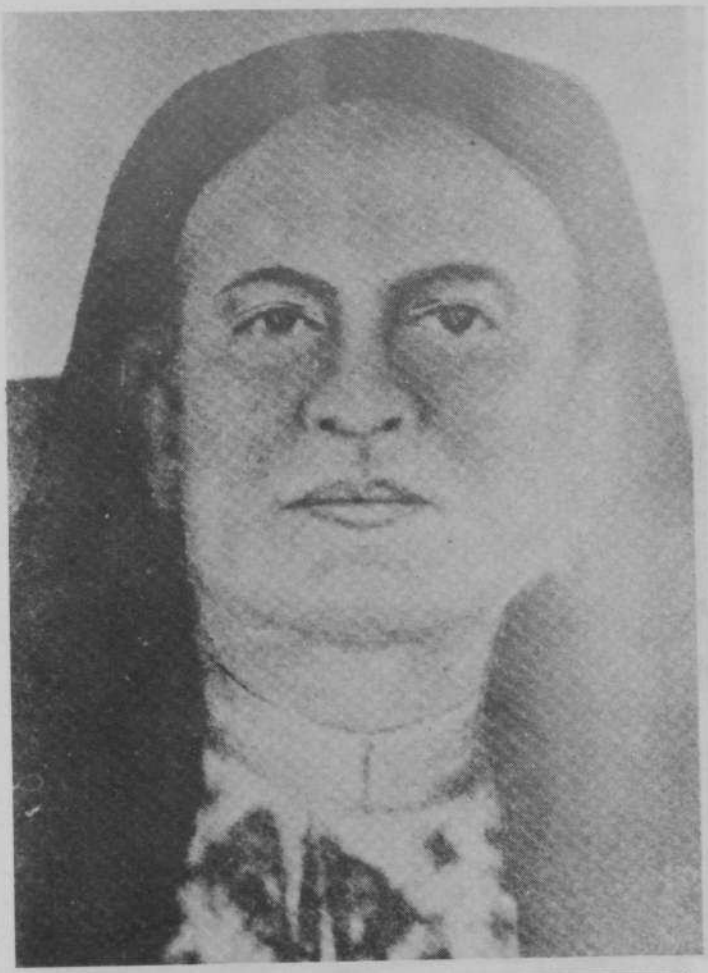
Sumber: A. Doep, *Gedenkboek van het Korps Marechausssee 1890—1940*, h. 186.)



Cut Meutia Keureutoe, isteri Teuku Chik Tunong, seorang Srikandi Aceh terkenal di pantai Aceh Utara.

Hukuman tembak mati yang dijatuhkan terhadap suaminya menyebabkan dia memusuhi penjajah Belanda untuk selama-lamanya. Bersama Pang Nanggroe, yang kemudian menjadi suaminya, ia menyalakan api perjuangan di seluruh daerahnya sampai bertahun-tahun lamanya. Ia gugur dalam sebuah pertempuran dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Pembantu Letnan W.J. Mosselman pada tanggal 25 Oktober 1910.

(Sumber: H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, h. 137; foto: *Lukisan Gambiranom.*)



Pocut Baren, isteri Keujruen Gume', Aceh Barat, salah seorang Srikandi Aceh yang amat tangguh. Pahanya tertembak oleh anggota patroli pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan W. Hoogers. Setelah bertahan sekian lama dengan lukanya yang semakin parah itu, akhirnya ia berdamai dengan Belanda. Belanda mengganti kaki yang luka dengan "kaki kayu".

(Sumber: H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, h. 81.)



Teungku Syekh Saman di Tiro, seorang ulama dan pemimpin Aceh terkenal yang disegani pihak Belanda.

Beliaulah yang memaklumkan perang melawan Belanda di Aceh menjadi "Perang Sabil"; meninggal dalam bulan Januari 1891 secara tiba-tiba.

(Sumber: G.B. Hooyer, *De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894*, III, h. 348; Paul van't Veer, *De Atjeh-oorlog*, h. 120; foto: *Lukisan Yusuf/Gambiranom.*)

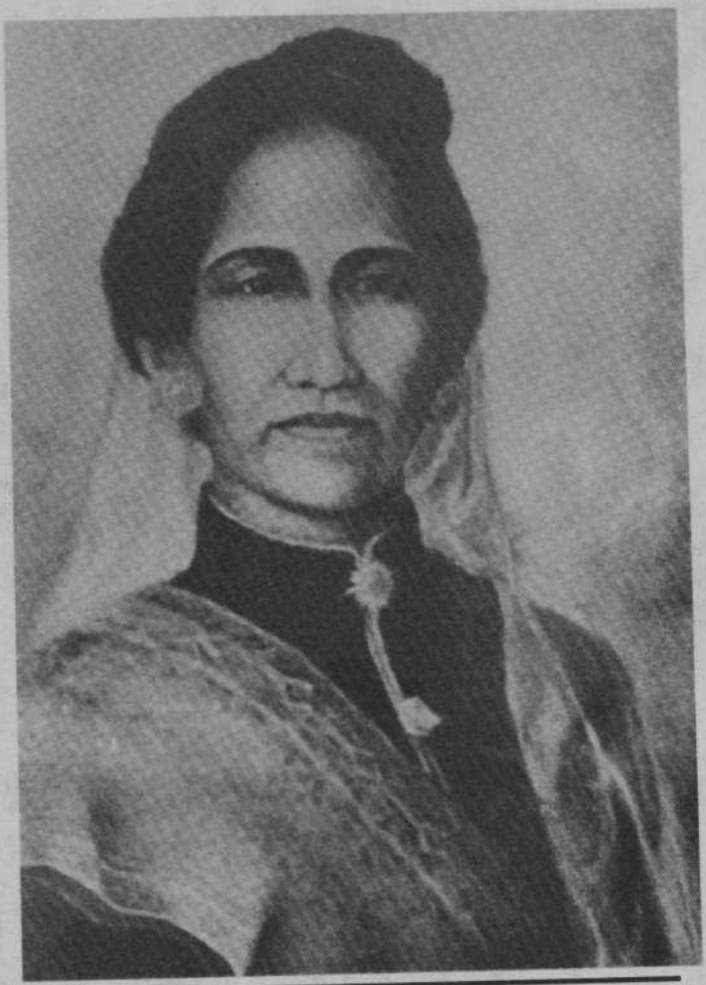


Teuku Umar pada masa mudanya. Ia adalah seorang Pahlawan Aceh yang ahli dalam siasat perang dan telah menimbulkan kerugian besar pada pihak Belanda.

(Sumber: J. Jongejans, *Land en volk van Atjeh, vroeger en nu*, h. 256b.)



Do Karim (Abdul Karim), seorang Penyair Perang yang amat terkenal. Pengarang *Hikayat Prang Kompeuni*, yang menjadi pembangkit api perang di Jalan Allah.



Cut Nyak Dien seorang Srikandi Aceh terkenal, isteri Teuku Umar. Bersama pasukan almarhum suaminya ia meneruskan perjuangannya melawan penjajah Belanda sampai tahun 1905. Pada tanggal 4 November tahun itu ia dapat ditangkap oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Van Vuuren dari kolonne Veltman di daerah Babah Krueng Manggi, Aceh Barat, dan kemudian dibuang oleh Pemerintah Belanda ke Sumedang (Jawa Barat). Ia meninggal di sana pada tanggal 6 November 1908. Karena kagumnya, penulis Belanda, Ny. Szekely-Lulofs, menggelarinya "Ratu Aceh".

(Sumber: Paul van't Veer, *De Atjeh-oorlog*, h. 240; foto: *Lukisan Dollah/Gambiranom.*)



Srikandi Aceh Pocut Meurah Biheue atau Pocut di Biheue.

Pada tanggal 1 November 1902, sebuah patroli Belanda di bawah pimpinan Let. Kol. T.J. Veltman yang terdiri dari 18 orang, beroperasi di Kampung Biheue (antara Sigli dan Padangtiji). Ketika berpapasan dengan Pocut Meurah pasukan Belanda mencurigai bahwa Pocut menyembunyikan sebilah pedang di balik sarungnya. Sewaktu hendak digeledah, dengan serta-merta Pocut Meurah menyerang anggota-anggota patroli dengan sebilah rencong.

Dalam serangan itu ia menderita luka-luka parah hampir di seluruh tubuhnya. Namun setelah sembuh, ia bahkan bertekad melakukan suatu tindakan pembalasan.

Berita tentang keberaniannya itu menyebabkan Kolonel Scheuer, pemimpin pasukan Belanda yang telah merebut Puri Cakra Negara di Lombok, sengaja datang ke Aceh untuk berjumpa dan menghormati srikandi itu.

(Sumber: H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, h. 73-74; foto: *Lukisan Gambiranom.*)



Gambar lukisan Tengku Fakinah
(Tengku Faki).

Teungku Fakinah, sorang Pahlawan Wanita lainnya yang muncul dalam Perang di Jalan Allah. Setelah suaminya syahid, Fakinah membentuk sebuah pasukan yang terdiri dari kaum wanita, yang terkenal dengan nama Sukey Fakinah.

47931988

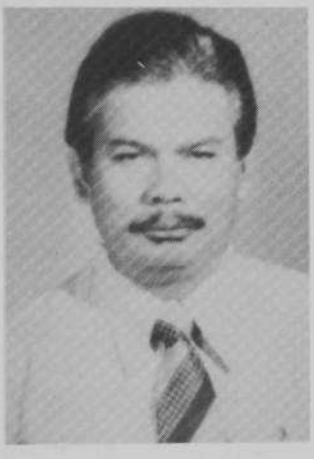
Drs. Anas Machmud, Dosen Jurusan Sejarah FPIPS IKIP Medan, dilahirkan di Kampung Panji, Koto Tangah, Sumatera Barat, pada 1 Oktober 1937.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar di kampungnya, melanjutkan ke SMP Negeri Binjai (Sumatera Utara) 1952—1955, dan Sekolah Guru A (SGA) Negeri Medan 1955—1958.

Pada tahun 1959 ditugaskan pemerintah menjadi guru pada Sekolah Percobaan Negeri di Medan di samping diberi kesempatan mengikuti Kursus B I Sejarah. Ternyata B I Sejarah itu sejak tahun 1962 diintegrasikan menjadi FKIP Universitas Sumatera Utara (USU) yang kemudian menjelma menjadi IKIP Medan. Di situlah penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Sejarah pada tahun 1968.

Sesuai dengan tingkat pendidikan yang diperoleh sejak tahun 1964, penulis ditugaskan mengajar pada Jurusan Sejarah IKIP Medan sampai sekarang. Jabatan yang pernah dipangku yaitu Ketua Jurusan Sejarah periode 1977/1979 dan 1979/1981, kemudian Pembantu Dekan III 1985/1988.

Di samping itu penulis pernah aktif sebagai Tenaga Tidak Tetap pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra USU, FIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, FKIP Universitas Islam Sumatera Utara, dan FKIP Samudera Langsa.



Perhatian penulis yang sangat besar terhadap sejarah Daerah Aceh terbukti dari berbagai makalah yang disampaikan pada beberapa seminar, seperti Seminar Kepahlawanan Aceh di Medan, Seminar Masuknya Islam di Aceh (1978), Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (1981) yang dilaksanakan di Rantau Kuala Simpang, Seminar Ilmu Pengetahuan di Takengon (1986), dan Seminar Hari Jadi Kota Banda Aceh (1988).

PT BULAN BINTANG **88.013.01**

Penerbit dan Penyebar Buku-buku

Jakarta 10420, Indonesia

ISBN 979-418-122-6 **Rp 2.500,00**